



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI PROGRAM BANTUAN USAHA MIKRO  
DI MASJID RAYA PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN**

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

**MAGISTER SAINS  
ILMU ADMINISTRASI**

**M. YUDI ALI AKBAR  
NPM : 2009942009  
KEKHUSUSAN : PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
2013**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : M. Yudi Ali Akbar  
NPM : 2009942009  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Pengembangan Masyarakat  
Judul Tesis : Pembedayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Hari : Sabtu  
Tanggal : 15 Juni 2013  
Pukul : 09.00 WIB

**Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Sidang : (.....)  
Pembimbing : Maria Sri Iswari, S.Sos, M.Si. (.....)  
Penguji Ahli : (.....)



## LEMBAR PERSETUJUAN

Bahwa Tesis yang berjudul:

**Pembedayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan**

Disusun oleh:

M. Yudi Ali Akbar

NPM : 2009942009

Kekhususan : Pengembangan Masyarakat

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan  
pada Sidang Tesis Program Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta, Mei 2013

Dosen pembimbing



**Maria Sri Iswari, S.Sos, M.Si.**

Pasca Sarjana  
Program Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Tahun 2013

- A. Nama : M. Yudi Ali Akbar  
NPM : 2009942009
- B. Judul Tesis : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program  
BantuanUsaha Mikro Di Masjid Raya Pondok  
Indah  
Jakarta Selatan
- C. Jumlah Halaman : halaman, halaman pendahuluan, isi tesis, 2  
daftar pustaka  
dan halaman daftar lampiran
- D. Ringkasan :

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian utama di negeri ini dan belum bisa ditangani dengan baik. Belum lagi masalah-masalah lain seperti pengangguran, pendidikan, politik dan lain sebagainya. Masalah kemiskinan selalu menarik untuk dibicarakan dari berbagai aspek, seperti masalah sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Penanggulangan kemiskinan melalui pengefektifan *basic communities* adalah suatu konsep kemandirian,

partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Logikanya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dicapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerfull*). Dengan pengertian lain kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan, oleh Schumacker disebut pemberdayaan (Tomas: 1992).

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan, dengan program pemberdayaan Zakat, Infak dan Shodaqoh yang di kelolanya berupaya memaksimalkan ZIS yang terkumpul untuk diberdayakan kepada masyarakat terutama mereka yang tidak mampu, melalui Bantuan Usaha Mikro bagi pedagang kecil di wilayah sekitar Masjid. Bantuan yang diberikan ditujukan untuk modal stimulan usaha kecil yang mereka lakukan.

Berdasarkan deskripsi temuan lapangan dan analisa yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro bagi para pedagang kecil sangat membantu dalam masalah permodalan, sehingga mereka dalam berusaha menjadi tenang, optimis, percaya diri dan dapat meningkatkan kesejahtraannya. Akan tetapi disatu sisi, pembinaan secara intensif kepada para anggota kurang maksimal.

## **SUMMARY**

Post Graduate Program

Magister of Administration Science Program

Social and Politic Faculty

Muhammadiyah University Jakarta

Thesis, Mei 2013

- A. Name : Muhammad Yudi Ali Akbar
- NPM : 2009942009
- B. Title : Depelopment of Society Through the Dirrect Micro

Poverty is a problem that is still a major concern in this country and can not be handled properly. Not to mention other problems such as unemployment, education, politics and so forth. The problem of poverty is always interesting to be discussed from various aspects, such as social, economic, and political psychology. Improve the effectiveness of poverty reduction through communities is a basic concept of independence, participation, and justice network. Basically empowerment placed on the power level of the individual and the social. Logically empowerment of the poor can be achieved when supported by a social structure that does not negatively of power (powerful). In another sense of the poor can be empowered through knowledge and independence so that they can act as agents of development, by Schumacker called empowerment (Thomas: 1992).

In order to alleviate poverty, Masjid Raya Pondok Indah, South Jakarta, to the Empowerment Program Zakat, Infak and Shodaqoh which in its management seeks to maximize the collected ZIS to be empowered to people especially those who are unable, through the Assistance to Micro, small traders in the area around the mosque. Assistance provided is intended for small business capital stimulants they do.

Based on the description of the findings and analysis of the existing field, it can be concluded that community empowerment through Micro Enterprise Assistance for small traders are very helpful in the problem of capital, so that they are in trying to be calm,

optimistic, confident and able to improve their family income successfully. But the one hand, intensive coaching to members less than the maximum.

## BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Yudi Ali Akbar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl. Lahir : Ciputat, 15 Juni 1977  
Status Perkawinan : Menikah  
Alamat : Jl. Jambu No. 8 RT 008/07 Kel. Cijantung Kec.  
Pasar Rebo  
Jakarta Timur  
Telepon : 0813 1460 9998 / 021 – 32144434  
Email : yudi\_ali2013@yahoo.com

### **Pendidikan Formal:**

1. SD Islam Utsmaniyah Rempoa Ciputat Tahun 1989.
2. MTsN 3 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 1992.
3. MA. Pondok Pesantren Daar El-Qolam Gintung Balaraja Tangerang Tahun 1996.
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2001.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberi nikmat dan kesempatan untuk menuntut ilmu di tempat ini. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan seluruh tahapan dalam proses penulisan tesis ini. Penelitian ini berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan*, yang merupakan suatu analisis kebijakan dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya dan pihak terkait dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di sekitarnya. Dalam proses penelitian ini Penulis banyak dibantu dan diarahkan oleh beberapa pihak. Untuk itu dengan rasa hormat dan terima kasih Penulis akan sampaikan kepada:

1. Ayahanda Drs. H. Mufroni Razak dan H. Abdul Djalil Mustaqim juga untuk (Almrh) Kusyati dan (Almrh) Hj. Tati Suprapti atas do'a dan kasih sayang mereka. Teruntuk Isteriku Kiki Wulandari yang selalu menemani dalam suka dan duka, juga anak-anak tercinta Naura Azizah Akbar dan Reza Althof Akbar yang setia dan menghibur dengan keceriaannya serta seluruh keluarga besar, Penulis sampaikan terima kasih yang tulus.

2. Ibu Dra. Susilahati, M.Si. Dosen Pembimbing Proposal Tesis pada Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Ibu Maria Sri Iswari, S.Sos, M.Si., Dosen Pembimbing Tesis pada Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Seluruh staf pada Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Sahabat dan teman-teman penulis, baik Pengembangan Masyarakat (PM) ataupun Otonomi Daerah (OTDA) yang telah memberi masukan dan pemikirannya yang sangat membantu Penulis.
6. Segenap Pengurus Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian di tempat ini, semoga Allah SWT. memberi balasan atas kebaikannya.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, Penulis mengharapkan saran dan masukannya, semoga bermanfaat untuk penyempurnaan penelitian dan penulisan ini.

Jakarta, 1 Mei 2013

**M. Yudi Ali Akbar**

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
SUMMARY IN ENGLISH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.. ..	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penjelasan Konsep.....	12
1. Pengembangan Masyarakat.....	12
a. Definisi.....	12
b. Pendekatan Pengemembangan Masyarakat .....	14
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	17
a. Definisi/Pengertian Pemberdayaan .....	17
b. Strategi Pemberdayaan .....	22
c. Tahapan Pemberdayaan .....	23

3. Kemiskinan.....	25
a. Definisi/Pengertian Kemiskinan .....	25
b. Jenis Kemiskinan .....	27
c. Ciri-ciri.....	30
d. Faktor Kemiskinan.....	33
e. Dampak Kemiskinan .....	34
f. Upaya Mengatasi Kemiskinan .....	34
4. Partisipasi .....	42
5. Kesejahteraan Sosial.....	47
a. Definisi Kesejahteraan Sosial .....	44
b. Tujuan Kesejahteraan Sosial .....	51
c. Pendekatan dalam Kesejahteraan Sosial .....	52
B. Aspek-aspek Konsep .....	53
C. Kerangka Pemikiran .....	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	55
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
B. Metode Penelitian .....	55
1. Teknik Pemilihan Informan .....	57
2. Teknik Pengumpulan Data .....	58
3. Teknik Analisis Data.....	60
4. Uji Keabsahan Data.....	61
5. Keterbatasan Penelitian .....	62

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum Lembaga.....	63
B. Analisis Hasil Penelitian.....	68
C. Hasil Penelitian.....	80
D. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN.....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Masalah

Sejak 1997-an akhir hingga kini, Indonesia telah mengalami berbagai tragedi yang memilukan hati dan menegangkan jiwa. Tragedi tersebut dipicu dan dipacu oleh krisis moneter (disparitas nilai tukar rupiah terhadap dolar) menjadi krisis ekonomi, dan berdampak luas pada semua bidang pembangunan menjadi krisis sosial, politik, dan budaya yang akhirnya pembangunan mengalami distorsi yang sangat parah.

Dengan demikian paradigma pembangunan yang dianut oleh para teknokrat selama itu adalah pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang pada hakeketnya tidak mampu mengatasi krisis yang terjadi di dalam negeri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suardi (2001: 1) dalam Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial:

Strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi atau *growth oriented strategy* yang dikembangkan oleh pemerintah masa lalu (Orde Baru), pada kenyataan belum mampu mengatasi krisis yang terjadi di dalam negeri, seperti kemiskinan, kesenjangan pembagian pendapatan, pengangguran dan keterlantaran anak, meskipun secara ekonomi berhasil meningkatkan GNP yang menggebirakan. Hal ini berarti pendekatan *tricle down effect* dan pendapatan sentalitis dimana dominasi keputusan mutlak pada Pemerintah Pusat, tidak mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup manusiawi.

Sedangkan Pambudi *et. Al.* (2003: 41) mengemukakan kegagalan pada masa Pemerintah Orde Baru berupa langgengnya kemiskinan dan kesenjangan sosial bahkan membangkitkan masalah-masalah baru yang lebih serius. Krisis fiskal negara, yang segera menyebar menjadi krisis ekonomi, dan kemudian menjalar menjadi krisis multi dimensi, yang sekaligus menjadi faktor pendorong mundurnya Soeharto dari kubangan kekuasaannya, merupakan babak penting yang memberi jelas pada rakyat, bahwa pembangunan sejak awal memang bukan jawaban atas problem kemiskinan dan ketidakadilan.

Pendekatan sentralistis disemua bidang pembangunan sebelum terjadi krisis semakin memperparah keadaan. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan daya responsivitas dan kreativitasnya dalam membangun masa depan dirinya. Ini mengindikasikan bahwa dalam kehidupan masyarakat telah terjadi ketidakberdayaan (*powerless*) untuk menghadapi perubahan dan permasalahan di satu pihak, dan semakin besarnya akumulasi frustrasi sosial dan kekecewaan berbagai unsur masyarakat di lain pihak. Akumulasi keresahan dan frustrasi sosial ini ditunjukkan oleh semakin luasnya keresahan sosial (*social unrest*), kerusuhan dan amuk massa, kekerasan (*riot*) yang sangat anarkis-destruktif, konflik sosial dan gejala disintegrasi sosial di berbagai wilayah di Indonesia (Selo, 1998). Disisi lain taraf kesejahteraan sosial masyarakat semakin

memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan terjadi peningkatan penduduk miskin dan permasalahan sosial lainnya.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian utama di negeri ini dan belum bisa ditangani dengan baik. Belum lagi masalah-masalah lain seperti pengangguran, pendidikan, politik dan lain sebagainya. Untuk memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) berkurangnya setengah jumlah penduduk miskin pada 2015, Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan dari 16,6 % dari jumlah penduduk pada 2004 menjadi hanya 8,2 % pada 2009.

Hasil sensus pada bulan Maret 2009 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 32,53 juta jiwa atau 14,15 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Data ini menunjukkan penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan hasil survey pada Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia bukanlah masalah kecil, mengingat jumlahnya yang begitu besar. Dari data yang dirilis oleh BPS tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa target ambisius pemerintah untuk mengurangi kemiskinan hingga 8,2 % pada 2009 gagal dicapai.

Kegagalan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada masa lalu disebabkan oleh kebijakan yang terpusat, memposisikan

masyarakat sebagai objek, memandang kemiskinan hanya dari aspek ekonomi saja dan masalah kemiskinan dianggap sama. Bahkan program penanggulangan kemiskinan tidak merangsang terciptanya lapangan kerja. Padahal lapangan pekerjalah yang dibutuhkan, agar penduduk miskin bisa meningkatkan pendapatannya.

Penanggulangan kemiskinan melalui pengefektifan *basic communities* adalah suatu konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Logikanya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dicapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerfull*). Dengan pengertian lain kelompok miskin dapat diperdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan, oleh Schumacker disebut pemberdayaan (Tomas: 1992).

Memberikan kekuatan (*power*) akan menghasilkan hirarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan oleh Simon (27-39: 1990) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*, berikut:

*Pemberdayaan adalah suatu aktivitas refleksif, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik.*

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakang ini di berbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda dan megerus kehidupan manusia akibat resesi international yang terus bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen nasional-internasional, serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Karena itu perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat (Craig dan Mayo, 1995)

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini akhirnya akan menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Salah satu agen international, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui uapaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri (Paul, 1987).

Kotze (1987) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang

digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian itu menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin. Oleh karena itu, pemberdayaan yang lebih menekankan kemandirian dianggap gagal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan yang lebih jelas dikemukakan oleh McArdle (1989) bahwa hal penting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Disisi lain pemerintah masih sangat minim dalam memberdayakan masyarakat secara sungguh-sungguh melalui berbagai macam program yang ada walaupun dilihat dari beberapa sisi pemerintah memiliki hal tersebut, seperti pendanaan, kebijakan dan juga sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Ketidaktahanan, ketidakberdayaan (*powerless*), keterasingan (*alienasi*), keterpurukan, keterlantaran, dan kerawanan sosial lainnya semakin tampak jelas dalam situasi ketersediaan sumber daya dalam mengatasi permasalahan sosial yang terbatas. Oleh karena itu, organisasi sosial (*orsos*), lembaga swadaya masyarakat (*LSM*), *NGO* (*lembaga non pemerintah*) sangat memanfaatkan kesempatan yang

mereka miliki, tanpa terkecuali Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan yang menerima dan menyalurkan dana melalui zakat, infak dan shodaqoh yang diterimanya.

Menanggapi permasalahan sosial masyarakat, Masjid Raya Pondok Indah mencoba melakukan program pemberdayaan yang diberi nama Pemberdayaan Zakat, dimana kegiatan ini dalam rangka membangkitkan partisipasi masyarakat untuk lebih mandiri, melalui kegiatan binaan bagi mereka dalam satu integrasi usaha dengan menekan aspek-aspek usaha dan partisipasi aktif. Kelompok masyarakat tersebut, dalam mengikuti kegiatan harus turut berpartisipasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya, karena mereka dapat mempengaruhi arah serta dapat berkembang atau kreatif, dari pada hanya menerima manfaat program tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Latar masalah tersebut memberikan informasi yang menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti masalah kemiskinan. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut adalah melalui program pemberdayaan. Searah dengan hal itu, Masjid Raya Pondok Indah yang di dalamnya terdapat lembaga penerima dan mengelola zakat, infak dan shodaqoh yang berasal dari jama'ah atau para

dermawan melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan Program Bantuan Usaha Mikro. Karena pemberdayaan itu bertujuan untuk menimbulkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan kekuatan atau daya yang ada padanya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Zakat dengan Program Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah.

### **D. Tujuan Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada semua pihak yang berkompeten dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penyempurnaan program pemberdayaan. Hal ini selanjutnya dapat dijadikan masukan didalam penyusunan suatu model intervensi yang didasarkan pada kemauan (prakarsa), kemampuan (swadaya) serta keterlibatan atau partisipasi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek dalam pembangunan.

## **2. Manfaat Akademis**

Memberi masukan dan sebagai kajian di bidang Ilmu Sosial khususnya dalam pengembangan masyarakat dan profesi pekerja sosial untuk mengembangkan lebih lanjut strategi dan tehnik-tehnik serta profesi yang diperlukan untuk membantu masyarakat secara luas.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari lima (V) bab dan bagian penutup yang mencakup daftar pustaka, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, menguraikan gambaran tentang latar masalah yang menjadi alasan utama tentang penelitian ini, kemudian focus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang konsep dan kerangka pemikiran. Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan secara rinci mengenai tinjauan pustaka dan teori atau pendekatan yang relevan dengan fenomena yang akan diteliti. Bab ini terdiri dari penjelasan konsep seperti pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, aspek-aspek konsep, kerangka pemikiran, dan alur pikir.

Bab III adalah metodologi penelitian, disini Penulis mencoba untuk memberikan penjelasan tentang desain metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari tipe penelitian, teknis analisis data dan keterbatasan penelitian. Adapun yang termasuk dalam bab ini adalah: tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, keabsahan data, dan keterbatasan penelitian.

Bab IV adalah hasil pembahasan. Bab IV ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian di lapangan dengan membuktikan teori yang di gunakan dalam bab II. Bab ini terdiri dari: deskripsi dan lokus penelitian, temuan penelitian, pembahasan, dan implikasi.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Dalam bab ini memuat kesimpulan sebagai intisari dari keseluruhan hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari tujuan

penelitian. Kemudian dari bab ini juga memberikan saran/rekomendasi untuk memperbaiki program yang dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan atas dasar penelitian.

Daftar Pustaka memuat beberapa referensi buku- buku atau literatur tentang teori organisasi, pemberdayaan masyarakat, pembangunan berdimensi kerakyatan dan literatur lain yang mendukung dalam penulisan ini.

Lampiran terdiri dari pedoman observasi, pengembangan instrument penelitian dan lain-lain sebagai pendukung dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penjelasan Konsep**

Tinjauan teoritis merupakan acuan signifikan dalam sebuah penelitian ilmiah karena akan berguna untuk memberikan batasan sekaligus mengarahkan pada fenomena yang akan menjadi sebuah telaah. Berikut ini akan diuraikan beberapa konsep dan teori yang berkorelasi dengan pembahasan penelitian ini.

#### **1. Pengembangan Masyarakat**

##### **a. Definisi Pengembangan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Meskipun PM memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, PM tidak hanya dilakukan oleh para pekerja sosial. PM juga menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencanaan kota, pengembang perumahan, dan kini sangat populer diterapkan oleh para industriawan di perusahaan-perusahaan besar, seperti Caltex, Rio Tinto, Freefort, Pertamina melalui pendekatan yang dikenal dengan nama *corporate social responsibility* maupun *corporate social investmen*. PM juga

sering dilakukan oleh para sukarelawan dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar (Suharto, 2005: 37-38)

Sebagaimana asal katanya, yakni pengembangan masyarakat, PM terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Sementara itu, masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998: 162):

- a. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan didaerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
- b. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama. Berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

## **b. Pendekatan Pengembangan Masyarakat**

Secara teoritis, PM dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, PM semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan alternatif yaitu pembangunan diajukan oleh beberapa organisasi non pemerintah yang dihasilkan dari analisa keterbelakangan dunia ketiga. Tujuannya untuk mengembangkan dan mendukung struktur pada level komunitas dengan usaha pemberdayaan yang memiliki kemandirian dari pemerintah, pembangunan bersifat lokal, berbasis budaya lokal, dan partisipasi tinggi dari masyarakat lokal.

Menurut Edi Suharto dan Dwi Yuliani *community development* adalah suatu pendekatan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat melalui pemberian kekuasaan pada kelompok-kelompok masyarakat agar mampu membuat, menggunakan dan mengontrol sumber-sumber yang ada

dilingkungan mereka (Edi Suharto dan Dwi Yuliani, Analisis Jaringan Sosial: 1).

Menurut mereka *community development* meliputi unsur-unsur berikut: *pertama* adanya pendekatan tertentu yang disebut *community work*, *kedua*, adanya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, *ketiga*, adanya pemberian akses kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjangkau sumberdaya, *keempat*, kemandirian masyarakat dalam membuat, menggunakan dan mengontrol sumberdaya menjadi tujuan pengembangan masyarakat.

Secara teoritis pengembangan masyarakat terbagi menjadi dua perspektif yaitu perspektif profesional dan radikal. Pendekatan profesional adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka sistem relasi sosial. Sedangkan pendekatan radikal, berpijak pada teori *structural neomarxis*, *feminisme* dan analisa anti rasis. Pendekatan ini lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka serta menganalisis sumber-sumber ketertindasan mereka (Edi Suharto, 2005: 40).

Selanjutnya pendekatan profesional dan radikal bisa dipecah menjadi enam ragam sesuai jenisnya yaitu perawatan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, pembangunan masyarakat, aksi masyarakat berdasar kelas, aksi masyarakat

berdasar jender dan aksi masyarakat berdasar ras (Edi Suharto, 2005: 41-42).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut tentang dua perspektif pengembangan masyarakat:

<b>Pendekatan</b>	<b>Perspektif</b>	<b>Tujuan/Asumsi</b>
Profesional (Tradisional, Netral dan Teknikal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawatan masyarakat</li> <li>2. Pengorganisasian masyarakat</li> <li>3. Pembangunan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat</li> <li>2. Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial</li> </ol>
Radikal (Transformasional)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksi masyarakat berdasarkan kelas</li> <li>2. Aksi masyarakat berdasar jender</li> <li>3. Aksi masyarakat berdasar ras</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat</li> <li>2. Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi</li> <li>3. Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif, dan eksploratif</li> </ol>

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah (Edi Suharto, 2005: 57 – 58).

Menurut Nazili Shalih Ahmad, Masyarakat adalah sekumpulan orang atau sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berfikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari mereka sebagai suatu kelompok (Alisuf Sabri, 2005 : 30)

Dalam mengetahui pengertian secara tepat apa itu pemberdayaan masyarakat, tentulah akan didapati berbagai macam perbedaan definisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetomo didalam bukunya, yang mengutip Hayden (1979: 175)

dimana beliau menyajikan sejumlah definisi berbeda dari tiap-tiap negara. Definisi tersebut tergantung kepada lokasi suatu negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, Rhodesia, bahkan Hayden pun menjelaskan konsep definisi *communtty development* menurut Persatuan Bangsa-Bangsa didapatkan sebuah pendefinisian *community development* secara patronase terhadap masyarakat makro, otoritarian pemerintah bersifat vertikal dibandingkan kepada komunitas. Hal ini disebabkan Persatuan Bangsa-Bangsa menerjemahkan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal

Menurut Payne (1997: 266), yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat ialah, membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Isbandi, 2002: 162).

Menurut Shardlow (1998: 32) sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi, melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Isbandi, 2002: 162 – 163).

Menurut Ife (1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini bukan diartikan hanya mengikut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

5. Sumber-sumber: kemampuan mobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi. Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Menurut Friedman (1992), pemberdayaan adalah suatu proses dan memiliki tiga kekuatan, yaitu kekuatan psikologis, sosial, dan politik. Kekuatan psikologis digambarkan sebagai rasa potensi diri yang menunjukkan perilaku percaya diri. Kekuatan sosial, menyangkut akses terhadap sistem sumber sebagai dasar produksi, seperti informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber-sumber keuangan. Kekuatan politik, meliputi akses terhadap proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri.

Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat ketika membahas soal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, mengutarakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat,

baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Suharto, 2005: 59-60).

## **b. Strategi Pemberdayaan**

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat,

manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

### **c. Tahapan Pemberdayaan**

Praktek pekerjaan sosial dalam melakukan pemberdayaan dalam hal ini menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Isbandi (2008: 244-258) adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan (*Engagement*). Pada tahap persiapan ini didalamnya sekurang-kurangnya adalah penyiapan petugas dan penyiapan lapangan yang dilakukan dengan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik yang dilakukan secara formal maupun informal.
2. Tahap assesment. Proses assesment yang dilakukan di sini dengan mengidentifikasi masalah dan jga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam proses assesment ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang ke luar dari pandangan mereka sendiri.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini agen perubahan (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasi masalah yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini agen perubahan membantu untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program kegiatan. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang telah direncanakan dengan baik dapat berubah dalam pelaksanaan di lapangan, apabila tidak ada kerjasama yang baik antara agen perubahan dan masyarakat.
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai suatu proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat yang melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas tersebut untuk melakukan pengawasan secara internal.

7. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap “pemutusan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3. Kemiskinan**

#### **a. Definisi Kemiskinan**

Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus menerus dikembangkan untuk mengungkap misteri tabir permasalahan kemiskinan yang membelenggu dan menjadi penyakit masyarakat. Karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, berkaitan dengan berbagai faktor yang saling kait mengkait. Di bawah ini dikemukakan pendapat para ahli mengenai pengertian kemiskinan agar tidak salah dalam interpretasi.

Levitan (1980) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sciller (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang, pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Sedangkan Mubyarto (1998: 33) mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, papan, hidup sehat, pendidikan, komunikasi sosial dan sebagainya. Senada dengan itu Menurut Kuncoro (1997: 103) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Pendapat Usman (2003: 33) hampir sama, menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papa, pendidikan dan kesehatan, serta hidupnya serba kekurangan.

Sedangkan menurut Sumodingrat (1999: 45) kemiskinan dapat diutarakan sebagai berikut:

Maslah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya, politik). Karena sifat multidimensionalnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (*mateial well-being*), tetapi berurusan dengan kesejahteraan sosial (*socal well-being*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, seperti kekurangan sandang, pangan, dan papan. Dengan

demikian standar kehidupan yang rendah ini secara langsung akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong miskin.

#### **b. Jenis Kemiskinan**

Berdasarkan pandangan tentang pengertian kemiskinan di atas, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari kebutuhan manusia yang bersifat ekonomi semata. Untuk itu program kemiskinan tidak hanya memprioritaskan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi yang lain yaitu pembangunan kualitas manusia.

Cambert (1987) mengemukakan bahwa kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkap kemiskinan (*deprivation trap*). Secara rinci *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Kemiskinan itu sendiri.
2. Kelemahan fisik.
3. Keterasingan.
4. Kerentanan.
5. Ketidakberdayaan.

Menurut Sinaga dan White dalam Alfian dkk., (1980: 143) terdapat beberapa pandangan tentang kemiskinan:

1. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan yang timbul akibat sumberdaya yang langka atau karena sumber teknologi yang rendah.
2. Kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan karena nilai-nilai budaya masyarakat tidak mendorong bahkan cenderung menghambat semangat berusaha untuk meningkatkan kondisi kehidupan.
3. Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang diderita oleh golongan masyarakat yang karena sosialnya menyebabkan kelompok tersebut tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Terjadi kelembagaan yang ada membuat kelompok masyarakat tidak menguasai sarana dan fasilitas ekonomi secara merata. Dampak dari kemiskinan ini adalah kemiskinan kronis atau kemiskinan yang terus menerus pada sekelompok masyarakat.
4. Kemiskinan sementara. Kemiskinan ini karena menurunnya pendapatan secara sementara akibat perubahan kondisi ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis.

Dalam kaitan ini, seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS). Belum ada hasil penelitian yang komprehensif mereka ini tergolong pada kelompok *destitute*, *poor* atau *vulnerable*. Namun dapat diasumsikan bahwa proporsi jumlah PMKS diantara ketiga kategori tersebut, membentuk piramida kemiskinan. Kelompok terbesar diperkirakan pada kategori paling miskin, diikuti oleh kategori miskin dan rentan (Nawawi, 2009: 121-122).

Sedangkan Kartasasmita (1996: 234) mengatakan bahwa kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah apabila jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan, dengan kelompok masyarakat yang lebih kaya.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004: 1-6) dalam Suharto (2005: 132-133) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang

umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibatnya rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

### **c. Ciri-ciri Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwujud wajah, bermatra multidimensional. SMERU misalnya, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut (Suharto *et.al.*, 2004: 7-8):

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).

2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam.
6. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan keberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Secara umum, ciri-ciri penduduk miskin ditandai dengan keterbatasan pendapatan dan modal usaha, memiliki keterbatasan mengakses berbagai sarana kebutuhan dasar. Secara rinci dapat diuraikan di bawah ini.

1. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan. Faktor produksi pada umumnya

sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin pada umumnya rendah, tidak sampai tamat SD. Waktu mereka pada umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena itu harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah tambahan.
4. Banyak diantara mereka yang tinggal dipedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan atau kalaupun ada relatif kecil. Pada umumnya mereka sebagai buruh tani atau pekerja kasar di pertanian, tetapi kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja yang esar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurangi mereka selalu hidup dibawah kemiskinan. Sehingga dengan kesulitan hidup di desa, mendorong mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.

5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan. Sedangkan di kota sendiri, terutama di negara yang sedang berkembang tidak siap mampu menampung urbanisasi penduduk yang datang dari desa itu. Apabila di negara maju, pertumbuhan sebagai menarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam pengembangan industri. Bahkan sebaliknya perkembangan teknologi di kota-kota negara berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota berdampak dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*) Nawawi (2009: 126-127).

#### **d. Faktor-faktor Kemiskinan**

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kemiskinan adalah :

1. Kelemahan fisik (kondisi kesehatan, gizi)
2. Isolasi (terjadi akibat lingkup jaringan yang terbatas)
3. Kerentanan (terkait pada tingkat kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan yang rendah dan mendadak)

4. Ketidakberdayaan dalam akses dalam pengambilan keputusan, sumber daya dan rendahnya posisi tawar menawar.

Masyarakat yang berada dalam kondisi ketidakberdayaan merupakan awal permasalahan. Hambatan dari pemenuhan kebutuhan ini berdampak pada faktor ekonomi, politik, sosial budaya. Pengaruh pada kehidupan sosial lebih disebabkan ketidakmampuan untuk pemenuhan kebutuhan sosialnya.

#### **e. Dampak Kemiskinan**

Masalah kemiskinan jika tidak ditangani secara tepat, maka akan mengakibatkan dampak yang tidak baik, seperti:

1. Menimbulkan dan meningkatkan permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.
3. Menimbulkan kebodohan dan kriminalitas.
4. Meningkatkan jumlah penduduk dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

#### **f. Penanggulangan kemiskinan**

Dalam upaya mengatasi dan memecahkan kemiskinan banyak para pakar dan ahli mengungkapkan berbagai pendapat dan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Adam, Hauff dan John (2002) dengan tegas menyatakan bahwa aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Menurutnya: “.....*the critical task of establishing and designing a system protect the population against sosial risk and to ensure an adquate standard of ;iving*” (Hauff dan John, 2002: 17)

Disisi lain Suharto (2005) mengungkapkan tanggungjawab negara dalam membangun dan mengembangkan sistem perlindungan sosial juga dilandasi konstitusi, baik pada aras internasional maupun nasional. Kematian anak-anak akibat busung lapar di NTB atau gizi buruk lainnya di NTT, Lampung dan daerah lain, sangat terkait dengan kemiskinan dan lemahnya perlindungan sosial. Kejadian itu harus diakui sebagai akibat penelantaran dan pengabaian yang dilakukan oleh negara (*state neglect*). Pemerintah dan perangkatnya, termasuk Pemda dan DPRD tidak melaksanakan mandat *state obligation* sebagaimana diamanatkan konvensi internasional, maupun konstitusi negara ini. Negara tidak menerapkan kebijakan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi

(*to protect*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak sosial, ekonomi dan budaya warganya.

Deklarasi Universal HAM Pasal 25 ayat 1 menyatakan :  
“Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya”. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob) Pasal 11 menyatakan “Negara-negara penandatanganan Kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan...”.

Dalam konstitusi Indonesia, hak atas dasar standar hidup layak telah diakui sebagai HAM. Pasal 28 ayat 1 Uud 1945 Amandemen II menetapkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 11 menyatakan ”Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.

Hak-hak sosial di atas merupakan kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat 4 Amandemen II yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak azasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapuskan kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun kantong-kantong kemiskinan. Disamping itu banyak program yang disusun untuk dilaksanakan di lapangan seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, program Takesra, Kukesra, membangun infrastruktur di pemukiman kumuh pengembangan model kawasan terpadu, termasuk pelaksanaan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain. Kalaupun sebagian besar rakyat, misalnya di NTB, NTT dan daerah lain adalah kewajiban negara untuk secara aktif mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah progresif membebaskan warganya dari kelaparan. Program JPS, Raskin dan dana kompensasi BBM telah terbukti gagal merespon problemas sosial di masyarakat lokal (Ismail Nawawi, 2006:137-138)

Menurut Todaro (2000: 223-224) ada elemen pokok dalam intervensi kebijakan pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan, yaitu:

1. Distribusi fungsional. Elemen ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tingkat hasil yang diterima dari hasil

faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah dan modal. Semua ini sangat dipengaruhi dari harga relatif dari masing-masing faktor produksi tersebut, tingkat pendayagunaan dan bagian prosentasi dari pendapatan nasional yang diperoleh masing-masing faktor tersebut.

2. Distribusi ukuran. Elemen ini berkaitan dengan suatu distribusi pemilikan dan penguasaan aset produksi, seperti faktor-faktor produksi non manusia atau sumber daya fisik dan faktor manusia yang terpusat dan tersebar kelapisan masyarakat. Distribusi pemilikan aset dan keterampilan pada akhirnya yang menentukan merata tidaknya distribusi pendapatan secara perorangan.
3. Program redistribusi pendapatan. Elemen ini ditempuh dengan cara pengambilan sebagian pendapatan golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi melalui pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi. Hasil pengambilan pajak ini selanjutnya dipergunakan untuk mengangkat kesejahteraan lapisan penduduk paling miskin. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dari hasil pajak, seperti digunakan untuk berbagai program bantuan pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan kelompok yang berpenghasilan rendah.

4. Peningkatan distribusi pendapatan langsung. Elemen ini terutama ditujukan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah. Sumber dan peningkatan produksi secara langsung diambilkan dari anggaran pemerintah yang berasal dari pemasukan pajak. Program peningkatan pendapatan secara langsung dari masyarakat miskin dikenal dengan pembayaran transfer (*transfer payment*). Selain itu elemen ini dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, pembebasan uang sekolah, pemberian subsidi pendidikan dan lain-lain. Cara ini ditempuh agar masyarakat miskin dapat memiliki daya beli tinggi dari pada tingkat pendapatan sebelumnya yang masih dilingkupi mekanisme pasar.

Penanggulangan kemiskinan dalam situasi krisis nasional telah dilaksanakan melalui program jaring pengaman sosial (JPS) atau *social safety net* (SSN) dan program kompensasi (CP) yang dipadu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan atau *Poverty Alleviation* (PA). Pada prinsipnya, program JPS bertujuan untuk membantu penduduk miskin agar tidak menjadi semakin miskin dan terpuruk, serta agar dapat hidup layak (Haryono, 1998); Justika, 1998). Sebagai inovasi sosial, JPS sudah mulai diterapkan pada awal 1880-an ketika pemerintah Otto von Bismark di Jerman dan David Lyod

George di Inggris melembagakan sistem perlindungan dan jaminan sosial (*sosial security*). Untuk selanjutnya, program ini diikuti oleh Amerika Serikat yang mulai diluncurkan pada 1935, Eropa Timur yang diluncurkan pada 1980-an (Justika, 1998). Adapun JPS masuk ke Indonesia termasuk ke dalam paket program strategi penyesuaian struktural atau *Structure Adjustment Programme* (SAP) yang disodorkan oleh lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *the Word Bank* berbarengan dengan pinjaman yang akan dikucurkan (Yulfita, 1998)

Sementara itu, Program Kompensasi (*Compensatory Programme*) bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk menolong penduduk yang secara langsung terkena dampak kebijakan penyesuaian stuktural ekonomi (*economic structural adjusment*). Kebijakan yang berlangsung secara bersamaan ini juga menimbulkan ekses bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) (Haryono, 1998). Adapun program penanggulangan kemiskinan merupakan program intervensi pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat (Hikmat, 2010: 128).

Upaya lain untuk menaggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah

gerakan yang massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip *silih asih*, *silih asuh*, dan *silih asah*.

Program lain yang diwujudkan dalam mengatasi kemiskinan adalah proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K); inpres desa tertinggal (IDT); kelompok usaha bersama (KUBE); kelompok belajar usaha (KBU); usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K); Takesra, dan Kukesra. Program di atas dilaksanakan atas inisiatif pemerintah melalui lembaga departemen atau non departemen. Sungguhpun telah dilakukan secara *masif* dan terpadu, ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara tuntas. Juga, belum mampu menumbuhkembangkan ketahanan sosial masyarakat secara optimal dalam menghadapi krisis ekonomi. Kegagalan ini – jika dapat dikatakan demikian–disebabkan oleh program-program tersebut terlalu berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, bersifat sektoral, dan cakupan pelayanannya sangat terbatas, serta bukan bertumpu pada pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat/

pengembangan manusianya (*human development oriented*) (Hikmat, 2010: 129).

Program-program tersebut dikembangkan atas dasar perspektif bahwa ekonomilah – sebagai tujuan akhir – yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataan, perspektif ini tidak terwujud. Berdasarkan perspektif pembangunan sosial, sesungguhnya ekonomi harus ditempatkan sebagai cara (*means*) bukan sebagai tujuan akhir, sedangkan tujuan akhirnya (*ends*) adalah kualitas hidup manusia itu sendiri (Harry, 1999). Dengan demikian, setiap indikator keberhasilan harus dilihat manfaatnya terhadap peningkatan kualitas hidup manusia dan kemaslahatannya (*well-being*).

#### **4. Partisipasi**

Istilah partisipasi sering dikemukakan sebagai sebuah konsep yang dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan. Para ahli telah memberikan berbagai pengertian partisipasi. David dalam Syamsi (1986: 54) mengemukakan pendapatnya mengenai partisipasi sebagai berikut:

*“Participation is defined as mental and emotional involment of person in group situation that encouerge them to contribute to group goal and share responsibility”.*

(Partisipasi itu sendiri diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok baik secara mental maupun emosi untuk memperkuat mereka serta untuk

memberi masukan terhadap pencapaian tujuan kelompok dan membagi tanggung jawab masing-masing).

Kemudian Syamsi (1986: 114) menyatakan bahwa “Kalau seseorang telah mengatakan kesediaanya maka ia harus melaksanakannya dengan nyata, pelaksanaan nyata inilah yang dinamakan partisipasi”.

Menurut Mubiyarto (1988: 35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri. Sedangkan menurut Mikkelsen (1999: 64-65) mengartikan partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan membina dan keamanan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan parata staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai kontak lokal dan dampak-dampak sosial.

- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membangun diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Partisipasi adalah gejala demokratis, dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangannya dan tingkat kewajibannya (Poerbawakatja, 1980: 23).

Dengan demikian partisipasi dapat disimpulkan bahwa di dalam partisipasi harus ada tujuan kelompok lebih dahulu, harus ada dorongan untuk menyumbangkan atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan kelompok, keterlibatan tersebut baik fisik, mental maupun emosi, harus ada rasa tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan kelompok.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan dari bawah, dikenal dengan pendekatan partisipasif. Dengan pendekatan partisipasif, proses kegiatan masyarakat beralih dari sifat *top-down* menjadi proses *bottom-up*. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kelompok dan membagi tanggung jawab dengan mereka (Effendie, 2008: 89).

Conyer (1991: 154-155) dalam Effendie (2008: 91) menyatakan tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat tanpa adanya partisipasi maka program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.
- b. Masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dari mulai proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek.
- c. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat mereka sendiri, yaitu masyarakat mempunyai hak dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya.

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat, kita perlu mengetahui situasi dan kondisi yang menguntungkan, partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat itu tidak sama, menurut Jadov (1980) dalam Murtati (2002: 20-21) antara lain:

- a. Apakah ada kesempatan atau waktu luang akan turut serta dalam berpartisipasi, karena waktu luang akan memungkinkan orang berpartisipasi.
- b. Apakah ada keinginan dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan mau berpartisipasi, kesadaran yang timbul dari seseorang tanpa karena terpaksa akan mewujudkan partisipasi yang murni.
- c. Apakah faktor psikologis seperti rendah diri dapat mempengaruhi orang yang mempunyai sifat rendah diri untuk berpartisipasi.
- d. Apakah pendidikan seseorang juga mempengaruhi orang untuk berpartisipasi, sebab pendidikan rendah memungkinkan pula seseorang rendah berpartisipasi.
- e. Apakah ada pengukuhan-pengukuhan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk ikut dalam pembangunan.

Oleh karena itu partisipasi sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sumardjo dan Sahrudin (2004) mengandung makna peran serta seseorang dalam atau sekelompok orang atau sekelompok pihak dalam suatu kegiatan atau upaya dalam mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang berperan serta tersebut. Dimana unsur utama partisipasi adalah adanya kesadaran dan kesukarelaan dalam berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan keinginan partisipan, sehingga dalam berperilaku didasari pada

motivasi terutama pada motivasi intrinsik yang tinggi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasinya dan dalam menikmati hasil perilaku tersebut.

Oleh karena itu filosofi pengembangan partisipasi dari kacamata proses pembangunan adalah keberpihakan pada masyarakat dalam mewujudkan aspirasi dan kreativitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraannya.

## **5. Kesejahteraan Sosial**

### **a. Definisi Kesejahteraan Sosial**

Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional (Suharto, 1997). PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk

mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 2005: 1).

Masih menurut Suharto (1997) pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, misalnya merumuskan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *flatfom* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia (Suharto, 2002; Swasono, 2004).

Sehingga kalau mau jujur, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut paham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social society*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.

Jadi, kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah dimana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2004).

Disamping itu pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang

bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial (*social security*) yang diselenggarakan oleh negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial (*social assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*), semisal tunjangan pengangguran (*unemployment benefits*), tunjangan keluarga (*family assistance*) yang di Amerika dikenal dengan nama TANF atau *Temporary Assistance for Needy Families*). Beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengaman sosial (*social safety nets*) yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu (Suharto, 2005:2):

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

#### **b. Tujuan Kesejahteraan**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Ciri utama pembangunan kesejahteraan adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan

senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.

### **c. Pendekatan dalam Kesejahteraan Sosial**

Mengacu pada buku Charles Zastrow (2000), dalam Suharto: 10, ada tiga pendekatan dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang sangat berpengaruh dalam membentuk model *welfare state* (negara kesejahteraan) dalam rangka pemberantasan kemiskinan di negara-negara demokratis:

1. Pendekatan residual, yaitu pelayanan sosial baru perlu diberikan hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti institusi keluarga dan ekonomi pasar. Bantuan finansial dan sosial sebaiknya diberikan dalam jangka pendek, pada masa kedaruratan, dan harus dihentikan manakala individu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat berfungsi kembali.

2. Pendekatan institusional, yaitu memandang pelayanan sosial sebagai *charity for unfortunates*, pendekatan institusional melihat sistem dan usaha kesejahteraan sosial sebagai fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat modern. Individu dan kelompok dipandang sebagai warga negara yang sehat, aktif dan partisipatif. Kemiskinan bukan disebabkan oleh kesalahan individu, melainkan produk dari sistem sosial yang tidak adil, menindas, *sexist*, dan rasis yang kemudian membentuk sistem kapitalis. Metode pekerjaan sosial yang sering digunakan mencakup program-program pencegahan, pendidikan, pemberdayaan dan penguatan struktur-struktur kesempatan.
3. Pendekatan pengembangan, dimana pada pendekatan ini peran pemerintah sangat mendominasi serta pelibatan tenaga profesional, sasaran tugas atau bidangnya adalah masyarakat atau kelompok.

## **B. Aspek-aspek Konsep**

Aspek-aspek konsep yang telah dipaparkan dalam kerangka teori, maka dalam meneliti Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan akan dilihat batasan dari unsur-unsur yang menjadi perhatian dalam penelitian.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan dengan Program Bantuan Usaha Mikro ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut agar lebih baik.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini diawali dengan suatu pemikiran, bahwa kebijakan masa lalu dalam usaha peningkatan kesejahteraan seringkali tidak melibatkan warga, peningkatan kemampuan dan keterampilan serta akses yang cukup untuk memberdayakan warga. Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Masjid Raya Pondok Indah ini pada dasarnya ingin mendorong serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta warga yang mampu berdaya saing dengan memperhatikan asas demokrasi. Sehingga pada akhirnya masyarakat dapat mandiri dan kesejahteraan dapat meningkat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di wilayah sekitar Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2013.

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan melalui Program Bantuan Usaha Mikro. Untuk mengetahui substansi penelitian, maka pendekatan penelitian yang akan dipilih adalah kualitatif. A. Chaedar Alwasila (2002: 27) menjelaskan pengertian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan berbagai penyebab fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui pelibatan kedalam kehidupan aktor-aktor yang terlibat. Pendekatan yang paling cocok untuk mengungkap fenomena tersebut adalah etnografi yang dapat membantu memahami dalam pemahaman definisi situasi yang ditelaah, dan dalam memahami perspektif para partisipan, peneliti perlu melibatkan diri kedalam fenomena yang dikaji. Sifat realitas sosial yang paling baik

dikemassajikan dalam bentuk deskriptif yang kelak akan dilaporkan kepada pembaca dalam bentuk naratif.

Bogdan dan Biklen (1992), Denzim dan Lincoln (1994) Glesne dan Peshkin (1992) mengemukakan filosofi fundamental dalam penelitian kualitatif (A. Chaedar Alwasila, 2002: 26) yaitu:

1. Realitas (pengetahuan) dibangun secara sosial karena realitas adalah suatu bentukan, maka bisa ada realitas jamak di dunia.
2. Realitas dibentuk secara kognitif (dalam pikiran kita) maka kita tidak dapat dipisahkan dari peneliti.
3. Seluruh entitas (termasuk manusia) selalu dalam keadaan saling mempengaruhi dan proses pembentukan serentak.
4. Peneliti tidak bisa dipisahkan dari yang ditelitinya maka penelitian itu selalu terkait dengan nilai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Prasetya Irawan, 2004: 60). Dengan kata lain, bahwa penelitian deskriptif merupakan sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian deskriptif, gambaran atau fenomena suatu realitas sosial yang kompleks dapat dihasilkan secara lebih spesifik dan mendetail atau dengan kata lain mencoba untuk mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia (Sulistyo-Basuki, 2006). Newman (1997) mengemukakan penelitian deskriptif dengan: *“Descriptive research present picture of specific details of situation, social setting or relationships”*.

## **1. Teknik Pemilihan Informan**

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Moleong (2010: 132) mengemukakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim informal. Sementara Tylor dalam Grinnel (1993: 71) mengatakan bahwa informan yang baik adalah mereka yang memahami latar penelitian, terlibat aktif didalamnya, bersedia membantu, dapat meluangkan waktunya, dan memberikan tanggapan berdasarkan perspektifnya masing-masing.

Adapun teknik pemilihan informan adalah *purposive* (non probability), dimana responden dipilih berdasarkan pemilihan peneliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Alstons dan Bowles (1998: 34) bahwa tehnik ini membuat peneliti untuk memilih sample tersebut bagi studi peneliti untuk satu maksud (*pursposif*).

Informan yang dimaksud terdiri dari key informan yaitu ketua/pengurus program, ketua masjid dan anggota program. Sedangkan informan sekunder adalah tokoh masyarakat dan pengurus yayasan masjid.

Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi, Lincoln dan Guba (1985: 258). Jadi seorang informan adalah orang yang mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Disamping itu pemanfaatan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. (Bogdan dan Bilten, 1981: 65) dalam Moleong (2010: 132).

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian ini, menggunakan teknik wawancara mendalam atau *in-depth interview* yaitu pertemuan tatap muka yang berulang kali antara peneliti dan responden, yang diarahkan terhadap pemahaman perspektif responden terhadap kehidupan, pengalaman, atau

situasi yang diekspresikan melalui kata-katanya sendiri. (Taylor dan Bogdan, 1984: 77)

Sedangkan menurut Irawan Prasetyo (2006: 4-34) teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara Mendalam

Teknik ini digunakan selain untuk memperoleh data dan informasi juga untuk mengetahui tahapan-tahapan dari masing-masing pihak tentang permasalahan. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah anggota kelompok Senyum Mandiri, tokoh masyarakat, dan pendamping atau pengurus program Senyum Mandiri, yang memiliki informasi, memiliki pengaruh, memiliki wewenang atau berpotensi untuk mengatasi masalah.

b. Teknik Pengamatan (observasi)

Pada teknik ini peneliti mencatat informasi peristiwa yang disaksikan. Teknik ini digunakan untuk mendukung informasi tentang permasalahan yang diteliti.

c. Studi Dokumentasi

Untuk melengkapi pengumpulan data sekunder, juga dilakukan teknik penelusuran dokumen, diantaranya dengan melakukan studi kepustakaan terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari pihak terkait serta dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan skema penelitian yaitu peneliti ingin menggambarkan suatu fenomena dengan tidak mengaitkan dengan fenomena yang lain. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kelompok Senyum Mandiri Rumah Zakat di Pancoran Depok Jawa Barat.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2010: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kata-kata dengan penjelasannya. Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan metode kualitatif karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Dengan demikian data analisis dan deskripsikan secara kualitatif pula.

Hal tersebut senada apa yang dikatakan oleh Janice McDrury (*Collaborative Group Analysis of Data, 1998*) dalam

Moleong (2010) bahwa tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan model yang ditemukan.
- d. Koding yang telah dilakukan.

#### 4. Uji Keabsahan Data

Yang dimaksud keabsahan data menurut Moleong (2010: 320-321) adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: (a) Mendemonstrasikan nilai yang benar, (b) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan (c) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Moleong (2010: 324) menjelaskan bahwa untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan teknik perpanjangan keikutsertaan

Dengan demikian uji keabsahan data dapat dilihat dari derajat kepercayaan saja, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan teknik ketekunan pengamatan serta triangulasi dengan sumber lain. Triangulasi dengan sumber lain yaitu membandingkan dan mengecek suatu informasi/data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **5. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan karena oleh karena penelitian ini dibatasi hanya pada program pemberdayaan masyarakat melalui Program Bantuan Usaha Mikro oleh Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan.

Keterbatasan penelitian ini meliputi:

1. Tergantung dari pengetahuan yang dimiliki informan dalam beberapa aspek, sehingga hasil wawancara yang diperoleh bersifat subjektif
2. Hasil penelitian tidak bersifat generalisir
3. Penelitian ini mengumpulkan data kualitatif dan terbatas pada anggota yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga**

##### **A. 1. Sejarah Masjid Raya Pondok Indah**

Masjid Raya Pondok Indah (MRPI) terletak di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 1 Pondok Indah Jakarta Selatan, berdekatan dengan Mall Pondok Indah, merupakan salah satu masjid di ibukota yang tak pernah sepi dikunjungi ribuan jama'ah. MRPI dibangun oleh Yayasan Masjid Raya Pondok Indah pada tahun 1990.

Diketuai oleh H. Sudwikatmono dan didukung oleh Yayasan Pondok Indah dan PT Metropolitan Kencana Jakarta mengawali ide pembangunan masjid ini. Perencanaan pembangunan masjid dipimpin oleh Ir. H. Ismail Sofyan. Pembangunan yang dimulai pada tahun 1990 di bangun di atas lahan seluas 6.215 m<sup>2</sup> dengan bangunan terdiri dari 2 lantai. Lantai atas digunakan untuk ruang salat utama terdapat dinding kiblat, tanpa ruang mihrab. Sedangkan lantai bawah digunakan untuk ruang serba guna. Secara keseluruhan masjid dapat menampung lebih dari 4000, meski kerap mencapai lebih dari 7000 jama'ah jika menggunakan plaza masjid seluas 2000 m<sup>2</sup>.

Masjid yang diresmikan pada hari Jumat 4 Desember 1992 pukul 11.00 oleh H. Sudharmono, SH (Wakil Presiden RI) dilanjutkan dengan salat Jumat, mengacu pada konsep arsitektur masjid tradisional

yang dirancang apik sehingga tercipta bentuk baru, meski tetap mengekspresikan bentuk masjid susun tiga, serasi dan menyatu dengan lingkungan. Bangunan beratap susun – umumnya bersusun tiga lapis – adalah salah satu ciri yang banyak tersebar di pelosok nusantara. Disebutkan pula MRPI merujuk pada Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW.

Masjid Raya Pondok Indah juga dilengkapi tempat wudhu dengan 300 keran, 17 kamar kecil, perpustakaan dengan 8000 koleksi buku, ruang kantor, gedung serba guna dan ruang jaga. Dalam pengolahan tapak, ruang-ruang itu sengaja ditempatkan di bawah permukaan tanah dengan maksud agar bangunan masjid tidak terhalang oleh bangunan-bangunan lain sehingga penampilannya menjadi lebih anggun.

Masjid biru, itulah sebutan lain bagi Masjid Raya Pondok Indah ini. Sebutan ini dikarenakan dominasi dari Masjid Raya Pondok Indah yang berwarna biru seperti atapnya yang berwarna biru. Dilengkapi dengan menara yang berbentuk runcing setinggi 50 meter yang berujung bintang pada puncaknya, seolah merefleksikan sebarkas cahaya yang menerangi bumi beserta seluruh alam.

## **A. 2. Visi Misi Dan Usaha**

### **A. 2. 1. Visi**

Menjadikan masjid sebagai pusat unggulan dalam bidang peribadatan, dakwah, sosial keagamaan dengan sistem pengelolaan yang modern.

### **A. 2. 2. Misi**

- a. Melaksanakan, membina, mengembangkan, menanamkan dan menerapkan ajaran Islam yang berwawasan luas, toleran dan penuh persaudaraan dalam semangat ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Basyariyah.
- b. Membina dan mengelola masjid dan pendidikan sebagai wahana pembinaan watak dan kepribadian, dengan menerapkan manajemen modern yang terencana, terarah, terpadu, profesional, efektif dan efisien.
- c. Membangun, membina dan mengembangkan usaha-usaha yang bersifat bisnis yang relevan yang hasilnya untuk pengembangan dan menunjang kegiatan kemasjidan dan pendidikan.

### **A. 2. 3. Usaha**

Untuk mencapai tujuan dan sesuai dengan visi dan misi, usaha-usaha yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan fungsi dan aktifitas masjid sebagai tempat peribadatan, dakwah, pendidikan, pengembangan kebudayaan, tempat musyawarah dan kegiatan sosial.
- b. Meningkatkan fungsi dan aktifitas pendidikan dalam pengelolaan sekolah/madrasah, sesuai jenis dan tingkatannya, dari Group bermain sampai perguruan tinggi.
- c. Membentuk dan mengembangkan pengkajian Islam dalam berbagai aspeknya dengan memperhatikan unsur keislaman dan keindonesiaan.
- d. Menggali dan membuka sumber-sumber dana, termasuk pembukaan bentuk dan macam usaha yang relevan, dalam rangka menuju kemandirian dalam pendanaan berbagai kegiatan.
- e. Menerapkan majemen modern yang terencana, terarah, terpadu, profesional, efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengelolaan aspek fisik dan non fisik (kegiatan) masjid dan pendidikan.

#### **A. 2. 4. Susunan Pengurus**

Susunan Pengurus Yayasan Pondok Mulya

Periode 2007 – 2012

Badan Pembina : H. Sudwikatmono

Drs. H. Budiman Kusika

Badan Pengurus :

Ketua : Ir. H. Ismail Sofyan  
Wakil Ketua : Ir. Hj. Anna Rosita Subagdja  
Sekretaris : Agus Lasmono Sudwikatmono  
Wakil Sekretaris : Selviya Risjad  
Bendahara : H. Tirya  
Wakil Bendahara : H. Adang Kurnia Subagdja  
Anggota : H. Subagdja Prawata  
Fenza Sofyan  
Nugrahadi Darmawan Boediman  
Radian Risjad  
Budiman Soekirman  
Badan Pengawas : H. Ibrahim Risjad  
Ir. Soekirman

Disamping itu juga Masjid Raya Pondok Indah menerapkan standar pengelolaan manajemen organisasi professional yang sehat. Dikelola secara professional dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen organisasi yang tepat, efisien, dan efektif. Kegiatan Idarah berdasarkan struktur organisasi dan *job description* tugas fungsional yang jelas, perencanaan yang tepat dengan menerapkan administrasi, system keuangan dan pelaporan yang akuntable. Masjid Raya Pondok Indah menerapkan pemeriksaan audit keuangan dan administrasi secara berkala yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan meningkatkan

profesionalitas sumber daya melalui pengawasan ketat dan pengembangan kompetensi SDM yang terarah.

Berbagai kegiatan memakmurkan Masjid Raya Pondok Indah secara konsisten dan berkelanjutan dilaksanakan termasuk diantaranya peribadatan, dakwah, pendidikan dan perpustakaan, bimbingan haji, pengelolaan ZIS dan Baitul Maal Wat Tamwil, layanan kematian/jenazah, koperasi karyawan serta kegiatan social diantaranya meliputi pemberian beasiswa, klinik kesehatan, penyaluran bantuan/santunan dan khitanan.

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

### **1. Proses**

Pada aspek ini dilihat untuk mengetahui seberapa jauh anggota mendapatkan pemberdayaan dengan tahapan-tahapan proses pemberdayaan yang di lakukan. Isbandi Rukminto (2003) menyatakan bahwa, tahapan pemberdayaan meliputi tahap persiapan, tahap assessement, tahap perencanaan kegiatan, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan atau implementasi kegiatan, tahap evaluasi kegiatan dan tahap terminasi. Dalam aspek ini ingin di ketahui lebih jauh apakah tahapan-tahapan tersebut telah di lakukan.

### **a. Tahap persiapan**

Termasuk di dalam aspek instrumentasi kegiatan, penyelenggaraan kegiatan, otoritas lokal dukungan masyarakat dan lingkungan fisik, karena hal tersebut ikut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan masyarakat.

#### **1) Instrument kegiatan**

Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha mikro bagi pedagang kecil telah di tentukan oleh pengelola kegiatan.

#### **2) Penyelenggaraan kegiatan**

Penanggung jawab kegiatan bantuan usaha mikro dan pengelola penyaluran bantuan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha mikro. Mereka adalah pihak yang melaksanakan kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan dan pengakhiran kegiatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara kegiatan telah melaksanakan:

- a) Memverifikasi calon penerima bantuan
- b) Membina memonitoring dan mengevaluasi program
- c) Mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan pihak terkait, seperti pengurus wilayah atau RT/RW dan seluruh pengurus masjid.

### 3) Dukungan masyarakat

Masyarakat disekitar masjid perlu diidentifikasi dalam upaya menggalih sumber-sumber yang dapat di akses oleh warga dalam rangka penerimaan bantuan usaha mikro ataupun dalam proses pengelolaan usaha. Temuan di lapangan menunjukan masyarakat sekitar atau jamaah masjid mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan melalui bantuan usaha mikro bagi para pedagang kecil atau pengusaha kecil. Implementasi dukungan masyarakat ini menunjukan bahwa bantuan usaha mikro bagi para pedagang kecil mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Hal ini merupakan kondisi yang baik dalam rangka mendukung implementasi kegiatan, ini bisa dilihat dengan banyaknya para pengunjung atau pembeli yang datang ke tempat usaha mereka.

Dukungan masyarakat ini menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha mikro bagi para pedagang kecil tidak hanya memberi manfaat pada sasaran kegiatan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat lain.

Berikut penuturan H. Purwoto salah seorang Pengurus Masjid Raya Pondok Indah:

“Dalam memberdayakan masyarakat Kami juga melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar MRPI seperti Pengurus RT, RW dan tokoh masyarakat. Termasuk dalam melakukan kegiatan Bantuan Usaha Mikro yang mana dalam melakukan verifikasi Kami berkoordinasi dengan mereka.”

Sehubungan dengan hal itu, dalam model intervensi pekerjaan sosial, Anne Minahan yang dikutip oleh Suradi (2005) mendesain sebuah sistem dasar yang juga berlaku dalam intervensi komunitas, yaitu sistem klien, sistem pelaksanaan perubahan, sistem kegiatan dan sistem tindakan. Berdasarkan dasar tersebut maka desain kegiatan pemberdayaan sosial atau komunitas perlu menetapkan dengan tegas peranan masyarakat sekitar dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro. Diharapkan masyarakat sekitar menjadi salah satu sistem sumber, dan mendukung capaian kegiatan tersebut.

#### 4) Lingkungan fisik

Lingkungan fisik atau kondisi geografis merupakan kondisi yang menentukan implementasi dan keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Lingkungan fisik atau kondisi geografis perlu di pertimbangkan dengan cermat, sehingga mampu menyediakan sumber daya yang mendukung

pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama yang berkaitan dengan jenis usaha.

Penelitian ini menemukan kondisi geografis yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Lingkungan usaha para penerima bantuan usaha mikro bagi para pedagang kecil. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian keberadaan tempat usaha mereka sangat strategis karena letaknya dilingkungan Masjid Raya Pondok Indah yang notabene disekitar tempat tersebut banyak karyawan perkantoran sehingga bisa memenuhi kebutuhan para karyawan disekitar wilayah tersebut.

Mengingat banyaknya karyawan yang ada di sekitar jalan Masjid Raya Pondok Indah sehingga memperbesar peluang usaha. Berikut ini penuturan Ibu Sari anggota pemberdayaan:

"Tempat usaha kami ini sangat strategis, di sini banyak sekali karyawan di wilayah sekitar Masjid ini karena banyak perkantoran dan mall, cocok untuk berdagang di sini. "

#### **b. Assesment dan Perencanaan**

Termasuk dalam aspek Assesment dan Perencanaan pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Usaha Mikro, yaitu: Pedagang kecil, Pengelola Kegiatan Pendamping, Komponen kegiatan/kegiatan, dan anggaran.

## 1. Pedagang Kecil (Klien)

Penerima manfaat dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Usaha Kecil atau selanjutnya disebut dengan anggota pemberdayaan adalah mereka yang memiliki usaha dan telah diseleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pengurus Masjid Raya Pondok Indah.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum menerima manfaat kegiatan Penerima manfaat dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro, mereka dapat menambah modal usaha, dengan demikian penghasilan pun bertambah. Seperti dikatakan Ibu Sari:

"Sebelumnya saya cuma bisa jual mie ayam sehari hanya 2 Kg. Tapi semenjak ada Bantuan Usaha Kecil bagi para pedagang kecil, saat ini bisa menjual hingga 4 Kg/hari, otomatis penghasilan Saya bertambah."

Para pedagang kecil ini, kalau dilihat dari temuan lapangan termasuk dalam kategori kemiskinan struktural dan sekaligus kemiskinan budaya (Sumarjan: 1997). Kemiskinan struktural digambarkan adanya suatu kelompok masyarakat yang menderita kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa usaha yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan, pegawai negeri sipil kecil, para petani yang tidak memiliki tanah, nelayan yang tidak memiliki perahu, buruh tanpa keahlian khusus,

pemulng sampah dan sebagainya. Sebenarnya mereka hidup di tengah-tengah lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Tetapi disebabkan mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, teknologi, jiwa usaha, dan dorongan sosial untuk menggali kekayaan alam lingkungannya, maka mereka hidup dalam kemiskinan atau disebut dengan kemiskinan budaya. Senada yang dikatakan oleh Suharto et.al (2004) bahwa kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multi dimensional.

## 2. Pendamping

Salah satu unsur didalam Bantuan Usaha Mikro adalah pendamping yang memahami program kegiatan. Sebagai pendamping yang mengurus tugas-tugas teknis pendampingan, maka mereka seharusnya menguasai metode dan teknik-teknik intervensi langsung dalam pemberdayaan masyarakat atau intervensi komunitas. Kalaupun mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, sekurang-kurangnya mereka memiliki pengalaman yang memadai di bidang intervensi komunitas. Berikut ini penuturan Bapak Warja Pengelola BMT Usaha

Mulia yang bertugas menerima dan menyalurkan Program

Bantuan Usaha Mikro:

"Alhamdulillah pendamping disini tidak hanya datang kepada anggota untuk sekedar menanyakan keadaan perkembangan para anggota, tetapi juga memberi masukan, arahan, apabila ada anggota yang mengalami masalah. "

Berikut ini penuturan Ibu Sari:

"Ada pengurus selain ngasih pengarahan sama motivasi juga aktif mengawasi dan mengontrol."

Temuan di lapangan menunjukkan pendamping melaksanakan tugas dan perannya sebagai fasilitator, pemberdaya, mediator dan motivator (Soetarso). Berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan bagi warga dampingan sosial untuk mengakses pelayanan sosial. Berperan sebagai pemberdaya, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan baru mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi bagi warga dampingan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Perannya sebagai mediator yaitu menyalurkan warga dampingan atau anggota kelompok dengan pemilik sumber dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan perannya sebagai motivator yaitu mampu memberikan semangat kepada warga dampingan sosial dalam mengelola kelompo

pemberdayaan maupun melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik.

### 3. Komponen Kegiatan

Ada beberapa komponen kegiatan yaitu dalam Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro; advokasi yang meliputi kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan penyebaran informasi, kemudian kegiatan pemantapan pendamping, distribusi bantuan untuk usaha ekonomi produktif dalam bentuk uang tunai yang dikelola melalui BMT Usaha Mulya MRPI, selanjutnya dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk mengetahui sejauh mana proses yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan di lapangan menunjukkan seluruh komponen kegiatan telah dilaksanakan, sosialisasi kegiatan telah dilaksanakan. Berikut ini penuturan Bapak Warja, Pengelola BMT Usaha Mulya:

"Pertama-tama dilakukan kegiatan penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan. Ini untuk melihat kelayakan calon penerima bantuan sekaligus melihat kebutuhan dan jenis usaha yang sesuai. Selanjutnya diadakan kegiatan sosialisasi untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan."

### 4. Anggaran

Secara nominal, anggaran yang dialokasikan untuk Bantuan Usaha Mikro sudah memadai untuk membiayai penyelenggaraan program. Pertanyaan anggaran tersebut mencapai Rp. 50.000,000,-.

Berikut ini penuturan H. Purwoto, Pengurus MRPI:

"Kami menyiapkan untuk Program Bantuan Usaha Mikro 50 juta, yang kemudian di kelola dan disalurkan melalui BMT Usaha Mulia. Salah satu divisi atau bagian dari Kegiatan Usaha yang ada di MRPI."

Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa proses pencairan dana untuk kegiatan Bantuan Usaha Mikro melalui BMT Usaha Mulia berjalan lancar. Tetapi dana kegiatan tersebut baru dapat dicairkan bila mendapat persetujuan Pengurus MRPI.

### **c. Pelaksanaan**

Unsur-unsur didalam pelaksanaan merupakan bahan dasar yang diproses melalui rapat pengurus MRPI. Didalam tahap pelaksanaan ini dilaksanakan berbagai kegiatan yang dikelompokkan menjadi empat tahapan, yaitu; tahap awal, tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta terminasi

#### **1) Tahap awal**

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan program yang meliputi kegiatan seleksi pendamping. Seleksi pendamping merupakan upaya untuk

memperoleh pendamping yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas-tugas bidang intervensi komunitas.

Salah satu dari prinsip pemberdayaan sosial adalah memberikan kesempatan kepada klien agar mereka menentukan cara-cara yang terbaik untuk dirinya atau *self-determination*. Kesempatan untuk menentukan cara-cara terbaik bagi diri sendiri ini akan memberikan keyakinan bagi mereka, bahwa bantuan akan dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dengan bantuan itu mampu mengatasi masalah yang dihadapi *atau help people to help them self*. Berikut ini penuturan Bapak Warja, Pengelola BMT Usaha Mulya MRPI:

"Anggota yang menerima BUM sepakat untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani selama ini agar lebih berkembang dengan modal yang diberikan kepada mereka."

## 2) Tahap pemberdayaan

Pada tahap pelaksanaan ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pengelolaan Bantuan Usaha Mikro, administrasi kegiatan, pertemuan rutin kelompok, pertemuan pendampingan dan pengelolaan hasil usaha.

### **d. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian kegiatan. Keduanya memegang peranan penting,

karena menentukan keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan. Hal ini dimaksudkan supaya proses dan hasil dari pelaksanaan PPM-BUM tercapai sesuai rencana. Berikut ini penuturan Bapak H. Purwota Pengurus MRPI:

"Pengawasan dilakukan melalui pendamping atau pengurus. Pendamping secara rutin datang untuk memantau perkembangan para anggota."

**e. Terminasi**

Istilah terminasi sangat dikenal didalam intervensi pekerjaan sosial, baik mikro, meso maupun makro. Terminasi merupakan tahap pengakhiran kegiatan, karena semua tahapan telah dilalui sesuai waktu yang direncanakan, dan tujuan dari intervensi telah tercapai. PPM-BUM MRPI sebagai model dari intervensi pekerjaan sosial, tentunya pada akhir proses pemberdayaan menetapkan terminasi dan kemudian tindak lanjut program tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Berikut ini penuturan Ibu Sari:

"Seharusnya ada tindak lanjut baik pengawasan maupun tambahan modal agar kami bisa lebih mandiri."

### **C. Hasil Penelitian**

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Masjid Raya Pondok Indah melalui program Bantuan Modal Usaha dalam rangka untuk membina usaha kecil, membantu modal usaha terus diupayakan walau belum optimal dalam pembinaannya. Namun demikian, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi manfaat dari Zakat, Infak dan Shodaqoh yang dikelola dan diberdayakan melalui bantuan usaha mikro kepada pedagang kecil terus dilakukan.

Penilaian tersebut didasarkan diantaranya bahwa pemberdayaan berupaya mencapai peningkatan kesejahteraan dengan cara mengembangkan pribadi dan kondisi sosial-ekonomi. Karena yang dirasakan oleh mereka adanya manfaat yang cukup signifikan.

Dengan demikian dapat dikatakan, adanya Program Pemberdayaan ZIS melalui Bantuan Usaha Mikro telah memberikan nilai tambah bagi pedagang kecil khususnya mereka yang menjadi anggota program tersebut. Para pedagang kecil tersebut, telah meningkat hasil usahanya karena mengikuti program yang dilaksanakan oleh lembaga ini.

### **C.1. Peningkatan Pengetahuan**

Manfaat lain yang dirasakan dari Program Pemberdayaan ZIS melalui bantuan usaha mikro bagi pedagang kecil adalah peningkatan pengetahuan para anggotanya. Dalam hal ini, para pedagang kecil mendapatkan tambahan pengetahuan, sehubungan dengan pengelolaan modal, produksi, dan akses pemasaran usaha.

Kedua informan utama penelitian ini mengemukakan, kegiatan utama yang dilakukan dalam Program Pemberdayaan ZIS melalui bantuan usaha mikro adalah simpan pinjam dan pembinaan usaha. Menurut mereka, tambahan pengetahuan justru lebih banyak didapat dari hubungan antar personal dengan sesama pedagang, walaupun pengurus juga memberika pengetahuan dari sisi lain, seperti pengetahuan keagamaan.

Ny. Sari mengatakan, ia kenal dengan bebarapa pengurus, namun ia merasa tak pernah mendapat pembinaan khusus. Hanya saja ia sering ngobrol dengan para pengurus, tentang segala macam hal termasuk tentang modal dan dagangannya. Begitupun halnya dengan Ny. Neni.

Ny. Sari mengatakan pembinaan lebih ditekankan pada pembinaan personal, berdasarkan masalah yang dialami masing-masing pedagang. Ia sendiri mengatakan, jarang berkonsultasi dengan Pengurus. Hanya ketika mengalami permasalahan yang dialami, maka Ny. Sari ngobrol dengan pengurus program mengenai

usahanya. Maklum, Ny. Sari cenderung mampu memprediksi dagangan yang dijualnya.

Menurut salah seorang Pengurus Badan Pengelola ZIS, pembinaan terus dilakukan dalam rangka menambah pengetahuan para anggota. Pembinaan memang lebih banyak dilakukan secara informal, karena pembinaan secara informal dan perorangan lebih mengena pada sasaran. Disamping waktu mereka yang sibuk berdagang.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menganalisisnya sebagai berikut. Dilihat dari tingkat pendidikan para informan utama, hanya seorang yang berpendidikan SD, sedang lainnya SMP. Dari kenyataan ini dapat diasumsikan bahwa para informan utama itu memang tidak memahami cara pembinaan yang dilakukan oleh Pengurus BMT sebagai pengelola program pemberdayaan ZIS melalui Bantua Usaha Mikro untuk para pedagang kecil. Karena mereka tidak dikumpulkan dan diberi ceramah secara bersamaan, melainkan dibina secara individual berdasarkan masalah masing-masing, maka mereka menganggap itu hanya obrolan biasa. Jadi sebenarnya transfer pengetahuan itu ada, walaupun kuantitas dan kualitasnya belum optimal. Kalaupun ada sifatnya melalui kegiatan pengajian, tidak secara khusus pembinaan usaha.

## **C.2. Peningkatan Ketrampilan**

Manfaat lain yang dirasakan dari Program ini adalah peningkatan ketrampilan anggotanya. Ketrampilan ini tentu saja yang berhubungan dengan profesi sebagai pedagang kecil. Semua informan utama penelitian ini menyatakan, mereka tak banyak mendapat tambahan ketrampilan dari Program Bantuan Usaha Mikro, karena kegiatan utama dalam program tersebut adalah simpan pinjam.

Ny. Sari mengatakan, sepengetahuannya kegiatan sehari-hari Program Bantuan Usaha Mikro ini adalah meminjamkan modal yang dikelola melalui BMT Usaha Mulya. Ia menyatakan, tak tahu sama sekali tentang kegiatan Program ini, yang penting baginya adalah mendapat pinjaman modal. Tetapi melalui obrolan tentang bagaimana mengelola modal dapat dikatakan sebagai tambahan pengetahuan dan ketrampilan dalam berdagang.

Memang, menurut salah satu pengurus program ini, mengatakan mengutamakan pembinaan pengelolaan modal bagi usaha kecil. Namun demikian, bukan berarti Program ini tidak mendorong sama sekali peningkatan ketrampilan para anggotanya. Upaya peningkatan ketrampilan hanya disisipkan secara sambil lalu. Sebagai contoh, melalui pengajian dilakukan, walau tidak dalam forum khusus.

### **C.3. Peningkatan Kepercayaan Diri**

Manfaat lain yang diperoleh dari Program Bantuan Usaha Mikro adalah peningkatan kepercayaan diri para anggotanya. Kepercayaan diri dalam hal ini dimaksudkan sebagai kepercayaan diri para pedagang kecil untuk terus maju dalam usaha, yang ditandai dengan semangat bekerja dan terus meningkatkan kemampuan menjual hasil produksi yang berkualitas.

Informan utama penelitian ini mengemukakan, kepercayaan diri mereka tidak berkaitan langsung dengan keikutsertaan dalam Program Bantuan Usaha Mikro. Profesi mereka dari dulu adalah pedagang, jadi mereka selalu percaya diri untuk berdagang apabila ada modal. Hal utama yang mereka butuhkan adalah modal untuk memproduksi barang dagangan. Menjadi Anggota Program Bantuan Usaha Mikro yang dikelola melalui BMT Usaha Mulya atau tidak, mereka tetap percaya bahwa dagangannya akan dibeli orang. Mereka percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan pasti membuahkan hasil, walaupun karena situasi tertentu, ada rasa khawatir dagangannya tidak laku, misalnya kekhawatiran pengunjung atau pembeli sepi. Kepercayaan diri lebih diartikan sebagai keberanian untuk mengelola modal sebaik mungkin dan memprediksi pasaran.

Ny. Sari mengatakan, kalau ada banyak modal, ia bisa berdagang lebih banyak dengan harapan keuntungannya juga lebih banyak. Dimana sebelumnya ia hanya menjual Mie Ayam sebanyak 2

kg/hari, kini menjual hingga 3-4 kg/hari. Ny. Neni mengatakan, uang adalah modal utama dalam berdagang, sehingga akan sulit baginya untuk membeli bahan mentah kalau tak ada uang.

Para informan utama tersebut mempunyai kesamaan pendapat, bahwa modal uang merupakan salah satu hal yang membuat mereka percaya akan keberhasilan. Oleh karena itu, diakui atau tidak, keberadaan Program Bantuan Usaha Mikro telah meningkatkan kepercayaan diri para pedagang kecil dalam berusaha. Bahkan, bukan hanya dalam masalah uang (modal) para pedagang meningkat kepercayaan dirinya, namun juga dalam hal pemasaran.

Menurut Badan Pengelola ZIS, adanya simpan pinjam dalam program tersebut semakin mendorong para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya. Bagaimanapun, modal merupakan kebutuhan utama para pedagang kecil, sehingga dengan adanya akses modal yang mudah, kepercayaan diri mereka bertambah.

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa modal adalah syarat penting bagi kepercayaan akan berhasilnya suatu usaha. Selain itu adanya sarana dan fasilitas untuk usaha juga menjadi bagian dari kepercayaan diri para pedagang. Oleh karena Program Bantuan Usaha Mikro membantu modal serta memfasilitasi usaha mereka dalam berdagang, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut telah berperan dalam menumbuhkan kepercayaan diri para pedagang kecil.

#### **C.4. Peningkatan Motivasi Usaha**

Manfaat lain yang juga dirasakan dari adanya Program Bantuan Usaha Mikro adalah meningkatnya motivasi usaha para anggotanya. Dengan meningkatnya motivasi usaha para pedagang kecil, diharapkan akan tercipta wiraswastawan-wiraswastawan yang handal di masa mendatang.

Informan utama penelitian ini mengemukakan, motivasi mereka untuk berusaha memang meningkat dengan adanya Program Bantuan Usaha Mikro. Menurut mereka, pinjaman modal dari Program Bantuan Usaha Mikro yang dikelola oleh BMT Usaha Mulya sangat berarti bagi eksisnya usaha para pedagang kecil. Menurut mereka, modal adalah masalah vital, oleh karena itu modal selalu menjadi kebutuhan utama. Mudahnya akses terhadap pinjaman, pengembalian yang tidak terlalu membebani, dan cara pengembalian yang toleran sangat membantu usaha kecil. Selain itu penyediaan fasilitas usaha memberi harapan baru bagi para pedagang kecil.

Ny. Sari dan Ny. Neni menyatakan senang dengan adanya Program Bantuan Usaha Mikro yang di kelola melalui BMT Usaha Mulya, karena ia bisa memproduksi dan menjual dagangan lebih banyak. Adanya program tersebut telah mengurangi kekhawatirannya jika sewaktu-waktu tidak ada modal.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Efektivitas dari implementasi penelitian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan ditentukan oleh dua kondisi yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Dua faktor ini tidak dapat dilepaskan pada setiap implementasi kegiatan apapun, tidak terkecuali penelitian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan.

##### **1. Faktor pendukung**

Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat pengaruh implementasi penelitian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan. Berdasarkan temuan lapangan, faktor yang mendukung implementasi penelitian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan, yaitu:

- a. Semangat para anggota untuk berubah menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan para anggota melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama, pengembalian modal dan mengikuti kegiatan pendampingan.

- b. Dukungan tokoh masyarakat, ketua RT/RW setempat, para donator, serta seluruh pengurus MRPI pada proses kegiatan pemberdayaan.
- c. Dukungan warga masyarakat atau para jama'ah MRPI di luar anggota pemberdayaan dalam usaha yang mereka jalani.
- d. Kondisi lingkungan geografis yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan ini mudah dijangkau, karena mudah diakses dan dilewati oleh kendaraan-kendaraan umum.
- e. Faktor pendanaan yang cukup, fasilitas yang memadai serta SDM yang juga menjadi salah satu pendukung keberhasilan program ini.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dipahami sebagai kondisi yang memperlemah pengaruh implementasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor yang menghambat implementasi adalah:

- a. Proses pemberdayaan yang belum dirasakan sungguh-sungguh bagi para anggota, karena mereka kurang mendapat informasi mengenai program ini.
- b. Pengakhiran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro di Masjid Raya Pondok Indah tidak

ada kejelasan, bagaimana tindak lanjut setelah mengikuti program ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Permasalahan kemiskinan sebenarnya bisa diatasi bersama, dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Melalui konsep pemberdayaan, masalah tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam rangka penanganannya. Membuat masyarakat berdaya dengan kemampuan yang dimiliki seperti dalam memberikan akses untuk usaha. Bantuan usaha kecil atau mikro bagi para pedagang kecil untuk dikembangkan menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan. Diharapkan dengan sejumlah modal yang diberikan, mereka dapat mengelola modal tersebut untuk dikembangkan seperti berdagang.

Berdasarkan gambaran temuan lapangan dan analisa tersebut ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan mengenai Pembedayaan Masyarakat di Masjid Raya Pondok Indah:

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Usaha Mikro bagi para pedagang kecil merupakan bantuan untuk pengembangan modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Bantuan yang dimaksudkan sebagai bantuan bergulir, dengan syarat yang sangat mudah, fleksibel dengan bagi hasil, yang

diharapkan pengembalian modal tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lain yang membutuhkan bantuan modal usaha.

3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana para anggota tersebut dalam pengembalian modal, baik harian, mingguan ataupun bulanan.
4. Pengakhiran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Modal Usaha Mikro ini tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut setelah mereka dianggap sudah mandiri.

## **B. Saran**

1. Perlunya pemberian pemahaman atau informasi terhadap program yang diberikan atau yang diselenggarakan oleh pihak terkait agar para anggota mengetahui maksud dan tujuan dari program tersebut.
2. Pemberian pelatihan kewirausahaan dan keterampilan usaha lain yang dapat diterapkan kepada anggota sebagai tambahan pengetahuan dan keterampilan.
3. Diperlukan pemahaman yang tepat ketika mendesain sebuah kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas nasional atau pemerintah. Karenanya kerjasama antar lembaga terkait perlu dilakukan agar kegiatan tersebut dapat dikembangkan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002
- Alwasila, A. Chaedar, *Pokok Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Kiblat Buku Utama, 2002
- Baharsjah, Justika, *Social Safety Net dan Pelayanan Sosial bagi Masyarakat Keluarga Miskin* dalam Yulfita Rahardjo dan Ingrid Kolb-Hindarmanto (ed.), Jakarta: Unicef & PPT-LIPI, 1998
- Craig, G dan M. Mayo (ed.) *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*, London: Zed Books, 1995
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Gie, The Liang, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta: Haji Masagung, 1990
- Ife, Jim, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Australia: Longman, 1995
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Muda*, Jakarta: STIA LAN, 2004
- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UUP. AMP YJPN, 1997.
- Lincoln, Yvona S., dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills: Sage Publication, 1985.
- Mubyarto, *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media, 1998.
- Nawawi, Ismail, *Pembangunan dan Problema Masyarakat; Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009
- Pambudi, Himawan, S., et. al., *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.

- Sabri, H.M Alisuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara Indonesia, 1997
- Simon, B.L., *Rethinking Empowerment*, Journal Progressive Human Services, 1: 1990
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Sumarjan, Selo, *Prihatin Lahir Batin: Dampak Berbagai Krisis dalam Rumah Tangga*, dalam Roosmalawati Rusman dkk., (ed.) Jakarta: Unicef & PPT-LIPI, 1998
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta: PT. Gramedia, 1999.
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Suyono, Haryono, *Jaringan Pemberdayaan Sosial-Social Safety Net dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1998
- Syamsi, Ibnu, *Pokok-poko Kebijakan Perencanaan dan Pemograman dan Penganggaran Tingkat Nasional dan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Lain-lain:

[http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=26&Itemid=53](http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=53) tanggal akses 29 Maret 2009,

Profil Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta : Indah Mulya Press

**PEDOMAN WAWANCARA**  
Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Usaha Mikro  
di Masjid Raya Pondok Indah  
Jakarta Selatan

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Februari 2013  
Waktu : Pukul 14.00 – 15.00 WIB  
Tempat : Kantor BMT Usaha Mulya MRPI

**A. Identitas Informan**

1. Nama : Warja
2. Umur : 36 tahun
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Pekerjaan : Kabag. Pembiayaan BMT Usaha Mulya MRPI
5. Pendidikan : S1
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Tanggungan Keluarga : 3 orang
8. Alamat : Jl. Poncol Indah 3 RT. 05/02 Cirendeu Ciputat

**B. Pertanyaan :**

1. Tahap perencanaan program pemberdayaan
  - a. Bagaimana Anda mensosialisasikan program ini kepada masyarakat?  
Informan :  
Cara mensosialisasikan program ini pada awalnya dengan menjemput bola, dengan mencari calon anggota, bahwa Kami memiliki program pembiayaan untuk usaha kecil.
  - b. Strategi apa yang Anda gunakan untuk melakukan pendekatan terhadap sasaran?  
Informan :  
Strategi yang Kami lakukan diantaranya dengan jemput bola, menyebarkan brosur dan pengumuman yang disampaikan melalui masjid ketika sholat jum'at.
  - c. Apa nama programnya?  
Informan :  
Nama programnya adalah Pembiayaan Modal Usaha
  - d. Untuk siapa program ini diperuntukkan/kelompok sasaran program?

Informan :

Sasaran program ini diperntukkan untuk usaha mikro atau usaha menengah ke bawah

e. Bagaimana mencari anggota kelompok ?

Informan :

Dengan cara mendatangi wilayah sekitar masjid, melalui media brosur dan pengumuman di masjid.

f. Bagaimana anggota kelompok terbentuk? Apa saja tujuan dan tugas kelompok tersebut?

Informan :

Pada awalnya ada kelompok, tujuannya agar memudahkan komunikasi dalam sosialisasi program, tugasnya mengidentifikasi, menshare kegiatan usaha anggota kelompok.

g. Bagaimana proses penyusunan program?

Informan :

Dengan mempertimbangkan usulan anggota

h. Bagaimana peran pendamping?

Informan :

Peran pendamping membantu mencari solusi, menjadi penghubung antara anggota dan pengurus.

i. Bagaimana proses keputusan rencana kegiatan tersebut ditetapkan? Bagaimana mengesahkannya? Siapa saja yang terlibat dalam keputusan itu?

Informan :

Berdasarkan musyawarah/rapat kerja, mengesahkannya dengan kesepakatan anggota dan pengurus. Dan yang terlibat dalam keputusan adalah pengelola atau pengurus.

2. Tahap assesment

a. Bagaimana menentukan Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah?

Informan :

Melalui Badan Pengelola Zakat MRPI

b. Bagaimana Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah dapat memberdayakan anggota kelompoknya?

Informan :

Dengan cara pembiayaan usaha bagi mereka ikut dalam program pembiayaan usaha kecil

- c. Bagaimana potensi Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah bagi masyarakat?

Informan :

Sejauh ini potensinya cukup besar dilihat dari jumlah pendapatan atau kas ZIS, dan potensi manfaat yang dirasakan cukup besar bagi masyarakat.

3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan

- a. Bagaimana merencanakan Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah sebagai alternatif dalam pemberdayaan dan bagaimana prospeknya di masa mendatang?

Informan :

Tentunya ingin melakukan yang lebih luas ke berbagai daerah yang sudah ada saat ini, karena prospeknya cukup signifikan dan bagus dan kedepan diharapkan lebih maju lagi.

Anggota yang menerima BUM sepakat untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani selama ini agar lebih berkembang dengan modal yang diberikan kepada mereka.

- b. Siapa yang dilibatkan dalam melakukan pemberdayaan?

Informan :

Pengelola dan anggota kelompok

- c. Bagaimana keterlibatan Anda dalam merencanakan program pemberdayaan ini?

Informan :

Keterlibatan Saya sebagai penghubung, sharing kepada anggota, mencari solusi dan sebagai motivator

4. Tahap pelaksanaan program

- a. Bagaimana pelaksanaan program yang telah disepakati?

Informan :

Dijalankan sesuai kesepakatan dan disesuaikan dengan yang terjadi di lapangan.

- b. Sepengetahuan Saudara, siapa yang membina/membimbing?

Informan :

Pengelola dan pengurus

- c. Bagaimana bentuk binaan/bimbingan tersebut?

Informan :

Pelatihan untuk pengelola, seperti pelatihan manajemen dan memperbany referensi/literatur terkait masalah tersebut.

- d. Menurut Saudara, apakah semua rencana tersebut sudah dilaksanakan? Jika sudah bagaimana? Jika belum apa saja kendalanya?  
 Informan :  
 Sudah, kendalanya pada pengembalian pembiayaan dari anggota yang macet, kemudian belum bisa menjangkau daerah lain untuk melakukan pemberdayaan.  
 Disamping itu bagi para anggota juga mendapatkan bantuan beasiswa untuk anak-anaknya, yaitu pemberdayaan melalui beasiswa dan bantuan fasilitas untuk sarana usaha secara gratis, seperti pemberian gerobak usaha bagi anggota kelompok.
- e. Apakah ada sangsi dalam pelaksanaan program tersebut?  
 Informan :  
 Ada, bagi mereka yang melakukan kesengajaan kesalahan dalam program ini.
- f. Usaha apa yang dilakukan pendamping?  
 Informan :  
 Memantau dan mengevaluasi
5. Tahap pemanfaatan hasil program pemberdayaan
- a. Apakah Saudara telah melihat hasil dan manfaat dari program pemberdayaan ini? Keuntungan materi sebagai hasil usaha? Meningkatnya pengetahuan cara mengelola usaha? Meningkatnya keterampilan/ yang lainnya?  
 Informan :  
 Ya, tentu ada
- b. Selain anggota kelompok, adakah yang memperoleh manfaat?  
 Informan : Ada
- c. Apakah ada kegiatan rutin yang dikembangkan dari kelompok tersebut?  
 Informan : Tidak
- d. Apakah masyarakat lain ingin menjadi anggota kelompok dari program pemberdayaan ini?  
 Informan : Ada
6. Tahap evaluasi
- a. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pada kegiatan tersebut?  
 Informan :

Dilihat dari laporan pengembalian pembiayaan modal usaha dan juga dilihat dari pengembangan usaha para anggota

b. Siapa yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut?

Informan :  
Pengelola atau pengurus

c. Bagaimana hasil kegiatan Program Pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya?

Informan :  
Dilihat dari pendapatan, aset dan pengembangan usaha.

7. Tahap terminasi

a. Bagaimana anda menerapkan pemutusan hubungan terhadap anggota kelompok pemberdayaan tersebut?

Informan :  
Ketika para anggota sudah berdaya atau mandiri

b. Bagaimana pembinaan bagi anggota kelompok tersebut yang sudah mandiri?

Informan :  
Mengarahkan mereka agar modal yang mereka miliki disimpan untuk dikelola melalui BMT yang ada di MRPI ini agar dapat dimanfaatkan untuk anggota yang lain.

8. Faktor pendukung dan penghambat

a. Apa faktor-faktor pendukung program pemberdayaan?

Informan :  
Adanya sarana dan fasilitas yang sangat memadai, SDM, dan modal financial.

b. Apa faktor-faktor penghambat program pemberdayaan?

Informan :  
Dari internal ada SDM yang kurang professional, sedangkan dari eksternal kembali pada diri anggota kelompok dan terjadinya musibah yang diakibatkan faktor alam atau yang lainnya.

Untuk Pengelola

**PEDOMAN WAWANCARA**  
Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Usaha Mikro  
di Masjid Raya Pondok Indah  
Jakarta Selatan

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2013  
Waktu : Pukul 11.00 – 11.45 WIB  
Tempat : Kantor MRPI

**A. Identitas Informan**

1. Nama : H. Purwoto, SH.
2. Umur : 49 tahun
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Pekerjaan : Badan Pengelola ZIS MRPI
5. Pendidikan : S1
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Alamat : Jl. Salak, Perumahan Al-Falah 3 Blok N  
Pamulang Tangerang Selatan

**B. Pertanyaan :**

1. Tahap perencanaan program pemberdayaan
  - a. Bagaimana Anda mensosialisasikan program ini kepada masyarakat?  
Informan :  
Awalnya dirancang atau diprogram pada bulan Oktober yaitu pada rapat pengurus. Disamping menjemput bola, dengan mencari calon anggota, bahwa Kami memiliki program pembiayaan untuk usaha kecil yang disosialisasikan melalui pengumuman di Masjid atau mimbar jum'at, penyebaran brosur.
  - b. Strategi apa yang Anda gunakan untuk melakukan pendekatan terhadap sasaran?  
Informan :  
Disamping yang disebut di atas juga dilakukan pendekatan kepada pengurus RT/RW setempat dalam rangka mendata mustahik

- c. Apa nama programnya?  
Informan :  
Dhu'afa bergulir yaitu Program Pembiayaan Modal Usaha
- d. Untuk siapa program ini diperuntukkan/kelompok sasaran program?  
Informan :  
Sasaran program ini diperuntukkan sarana usaha atau bantuan usaha mikro. Seperti gerobak, sepeda atau yang sesuai dengan bidang jenis usahanya. Juga perbantuan untuk dhu'afa sewaktu-waktu, kerja sama dengan Bazis dan dinas sosial
- e. Bagaimana mencari anggota kelompok ?  
Informan :  
Dengan cara mendatangi wilayah sekitar masjid (RT/RW), melalui media brosur dan pengumuman di masjid. Dalam memberdayakan masyarakat Kami juga melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar MRPI seperti Pengurus RT, RW dan tokoh masyarakat. Termasuk dalam melakukan kegiatan Bantuan Usaha Mikro yang mana dalam melakukan verifikasi Kami berkoordinasi dengan mereka.
- f. Bagaimana anggota kelompok terbentuk? Apa saja tujuan dan tugas kelompok tersebut?  
Informan :  
Dikelompokan sesuai dengan bidangnya
- g. Bagaimana proses penyusunan program?  
Informan :  
Dengan mempertimbangkan usulan anggota yang disusun melalui raker (rapat kerja) pengurus
- h. Bagaimana peran pendamping?  
Informan :  
Peran pendamping membantu mencari solusi, membina, memotivasi dan treatment serta menjadi penghubung antara anggota dan pengurus.
- i. Bagaimana proses keputusan rencana kegiatan tersebut ditetapkan? Bagaimana mengesahkannya? Siapa saja yang terlibat dalam keputusan itu?  
Informan :

Berdasarkan musyawarah/rapat kerja, mengesahkannya dengan kesepakatan anggota dan pengurus. Dan yang terlibat dalam keputusan adalah pengelola atau pengurus.

2. Tahap assesment
  - a. Bagaimana menentukan Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah?  
Informan : Melalui Raker
  - d. Bagaimana Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah dapat memberdayakan anggota kelompoknya?  
Informan :  
Dengan cara pembiayaan usaha bagi mereka ikut dalam program pembiayaan usaha kecil
  - e. Bagaimana potensi Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah bagi masyarakat?  
Informan:  
Sejauh ini potensinya cukup besar dilihat dari jumlah pendapatan atau kas ZIS, dan potensi manfaat yang dirasakan cukup besar bagi masyarakat.
3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan
  - a. Bagaimana merencanakan Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah sebagai alternatif dalam pemberdayaan dan bagaimana prospeknya di masa mendatang?  
Informan:  
Tentunya ingin melakukan yang lebih luas ke berbagai daerah yang sudah ada saat ini, karena prospeknya cukup signifikan dan bagus dan kedepan diharapkan lebih maju lagi.
  - b. Siapa yang dilibatkan dalam melakukan pemberdayaan?  
Informan:  
Pengelola dan anggota kelompok
  - c. Bagaimana keterlibatan Anda dalam merencanakan program pemberdayaan ini?  
Informan:  
Keterlibatan Saya sebagai penghubung, sharing kepada anggota, mencari solusi dan sebagai motivator
4. Tahap pelaksanaan program
  - a. Bagaimana pelaksanaan program yang telah disepakati?

Informan:

Dijalankan sesuai kesepakatan dan disesuaikan dengan yang terjadi di lapangan.

- b. Sepengetahuan Saudara, siapa yang membina/membimbing?

Informan:

Pengelola dan pengurus

- c. Bagaimana bentuk binaan/bimbingan tersebut?

Informan:

Pelatihan untuk pengelola, seperti pelatihan manajemen dan memperbanya referensi/literatur terkait masalah tersebut.

- d. Menurut Saudara, apakah semua rencana tersebut sudah dilaksanakan? Jika sudah bagaimana? Jika belum apa saja kendalanya?

Informan:

Sudah, kendalanya pada pengembalian pembiayaan dari anggota yang macet, kemudian belum bisa menjangkau daerah lain untuk melakukan pemberdayaan.

Disamping itu bagi para anggota juga mendapatkan bantuan beasiswa untuk anak-anaknya, yaitu pemberdayaan melalui beasiswa dan bantuan fasilitas untuk sarana usaha secara gratis, seperti pemberian gerobak usaha bagi anggota kelompok.

- e. Apakah ada sangsi dalam pelaksanaan program tersebut?

Informan:

Ada, bagi mereka yang melakukan kesengajaan kesalahan dalam program ini.

- f. Usaha apa yang dilakukan pendamping?

Informan:

Memantau dan mengevaluasi

5. Tahap pemanfaatan hasil program pemberdayaan

- a. Apakah Saudara telah melihat hasil dan manfaat dari program pemberdayaan ini? Keuntungan materi sebagai hasil usaha? Meningkatnya pengetahuan cara mengelola usaha? Meningkatnya keterampilan/ yang lainnya?

Informan:

Ya, tentu ada

- b. Selain anggota kelompok, adakah yang memperoleh manfaat?

Informan: Ada

- c. Apakah ada kegiatan rutin yang dikembangkan dari kelompok tersebut?

Informan:

Secara tidak formal, tetapi melalui pengajian disampaikan

- d. Apakah masyarakat lain ingin menjadi anggota kelompok dari program pemberdayaan ini?

Informan: Ada

#### 6. Tahap evaluasi

- a. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pada kegiatan tersebut?

Informan:

Dilihat dari laporan pengembalian pembiayaan modal usaha dan juga dilihat dari pengembangan usaha para anggota

- b. Siapa yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut?

Informan:

Pengelola atau pengurus

- c. Bagaimana hasil kegiatan Program Pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya?

Informan:

Dilihat dari pendapatan, aset dan pengembangan usaha.

#### 7. Tahap terminasi

- a. Bagaimana anda menerapkan pemutusan hubungan terhadap anggota kelompok pemberdayaan tersebut?

Informan:

ketika para anggota sudah berdaya atau mandiri

- b. Bagaimana pembinaan bagi anggota kelompok tersebut yang sudah mandiri?

Informan:

Mengarahkan mereka agar modal yang mereka miliki disimpan untuk dikelola melalui BMT yang ada di MRPI ini agar dapat dimanfaatkan untuk anggota yang lain.

#### 8. Faktor pendukung dan penghambat

- a. Apa faktor-faktor pendukung program pemberdayaan?

Informan:

Adanya sarana dan fasilitas yang sangat memadai, SDM, dan modal financial.

b. Apa faktor-faktor penghambat program pemberdayaan?

Informan:

Dari internal ada SDM yang kurang professional, sedangkan dari eksternal kembali pada diri anggota kelompok dan terjadinya musibah yang diakibatkan faktor alam atau yang lainnya.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah  
Jakarta Selatan

Hari/Tanggal : Senin, 25 Februari 2013

Waktu : 10.15 – 11. 00 WIB

Tempat : Area Usaha MRPI

**A. Identitas Informan**

1. Nama : Ibu Sari
2. Umur : 38 tahun
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Pekerjaan : Pedagang Mie Ayam
5. Pendidikan : SD
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Tanggungan Keluarga : 3 (tiga) orang
8. Alamat : Jl. Tanah Kusir RT 010/11 Keb. Lama,  
Jakarta Selatan

**B. Pertanyaan :**

1. Tahap perencanaan program pemberdayaan
  - a. Dari siapa dan bagaimana Anda mendapatkan informasi ini?  
Informan : Dari pengurus BMT
  - b. Apa nama programnya?  
Informan : Namanya programnya bantuan pinjaman modal usaha
  - c. Untuk siapa program ini diperuntukkan/kelompok sasaran program?  
Informan : sepengetahuan Saya program ini untuk pedagang kecil
  - d. Bagaimana mencari anggota kelompok?  
Informan : Dari anggota dan pengelola
  - e. Bagaimana anggota kelompok terbentuk? Apa saja tujuan dan tugas kelompok tersebut?  
Informan : Saya tidak tahu
  - f. Bagaimana proses penyusunan program?  
Informan : Tidak tahu
  - g. Bagaimana peran pendamping?  
Informan : perannya mendampingi para anggota yang mendapat bantuan modal usaha agar semangat

- h. Bagaimana proses keputusan rencana kegiatan tersebut ditetapkan? Bagaimana mengesahkannya? Siapa saja yang terlibat dalam keputusan itu?

Informan : Saya tidak tahu, mungkin Pengurus

## 2. Tahap assesment

- a. Bagaimana menentukan Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah?

Informan : tidak tahu, Cuma informasinya dari pengurus

- b. Bagaimana Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah dapat memberdayakan anggota kelompoknya?

Informan : Ya, dapat

- c. Bagaimana potensi Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah bagi masyarakat?

Informan : sangat bagus untuk masyarakat kurang mampu

## 3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan

- a. Bagaimana Masjid Raya Pondok Indah merencanakan Program Pemberdayaan Zakat sebagai alternatif dalam pemberdayaan dan bagaimana prospeknya di masa mendatang?

Informan : Bagus, menjadikan mandiri

- b. Siapa yang dilibatkan dalam melakukan pemberdayaan?

Informan : Anggota

- c. Bagaimana keterlibatan Anda dalam merencanakan program pemberdayaan ini?

Informan : memberikan informasi kepada anggota yang lain

## 4. Tahap pelaksanaan program

- a. Bagaimana pelaksanaan program yang telah disepakati?

Informan : Diikuti saja

- b. Sepengetahuan Saudara, siapa yang membina/membimbing?

Informan : pengurus/pengelola BMT

- c. Bagaimana bentuk binaan/bimbingan tersebut?

Informan : informasi saja, biasanya sambil ngobrol-ngobrol

- d. Apakah ada sangsi dalam pelaksanaan program tersebut?

Informan : ada sangsi

- e. Usaha apa yang dilakukan pendamping?

Informan : memberi masukan-masukan atau jalan keluar apabila mengalami masalah

## 5. Tahap pemanfaatan hasil program pemberdayaan

- a. Apakah Saudara telah mendapatkan hasil dan manfaat dari program pemberdayaan ini? Keuntungan materi sebagai hasil

usaha? Meningkatnya pengetahuan cara mengelola usaha?  
Meningkatnya keterampilan/ yang lainnya?

Informan : ya, ada manfaatnya

b. Selain anggota kelompok, adakah yang memperoleh manfaat?

Informan : ada

c. Apakah ada kegiatan rutin yang dikembangkan dari kelompok tersebut?

Informan : tidak, setahu Saya tidak ada

d. Apakah masyarakat lain ingin menjadi anggota kelompok dari program pemberdayaan ini?

Informan : ada

#### 6. Tahap evaluasi

a. Bagaimana bentuk pelaksanaan yang dilakukan terhadap program pemberdayaan tersebut?

Informan : tidak tahu

b. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pada kegiatan tersebut?

Informan : mungkin dari laporan pengembalian modal

c. Siapa yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut?

Informan : pengurus atau pengelola BMT

d. Bagaimana hasil kegiatan Program Pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya?

Informan : kelihatan cukup lumayan

#### 7. Tahap terminasi

Bagaimana pembinaan bagi anggota kelompok tersebut yang sudah mandiri?

Informan : diarahkan untuk menaruh simpanannya melalui BMT

#### 8. Faktor pendukung dan penghambat

a. Apa faktor-faktor pendukung program pemberdayaan?

Informan : Dari pengurus, fasilitasnya dan sarannya

b. Apa faktor-faktor penghambat program pemberdayaan?

Informan : biasanya pengembalian pinjaman saja, kalau dagangan lagi sepi

**PEDOMAN WAWANCARA**  
Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah  
Jakarta Selatan

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 April 2013

Waktu : 14.45 – 15. 15 WIB

Tempat : Area Usaha MRPI

**B. Identitas Informan**

1. Nama : Ibu Neni
2. Umur : 36 tahun
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Pekerjaan : Pedagang Jus
5. Pendidikan : SMP
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Tanggungan Keluarga : 3 (tiga) orang
8. Alamat : Jl. Salak Perumahan Al-Falah Blok N  
No. 120 Pamulang Tangerang Selatan

**C. Pertanyaan :**

1. Tahap perencanaan program pemberdayaan
  - a. Dari siapa dan bagaimana Anda mendapatkan informasi ini?  
Informan : Suami
  - b. Apa nama programnya?  
Informan : Namanya programnya tidak tahu, yang Saya tahu bantuan pinjaman modal usaha
  - c. Untuk siapa program ini diperuntukkan/kelompok sasaran program?  
Informan : sepengetahuan Saya program ini untuk pedagang kecil
  - d. Bagaimana mencari anggota kelompok?  
Informan : Saya tidak tahu
  - e. Bagaimana anggota kelompok terbentuk? Apa saja tujuan dan tugas kelompok tersebut?  
Informan : Saya tidak tahu bagaimana kelompok tersebut terbentuk. Sedangkan tujuannya untuk penambahan modal usaha

- f. Bagaimana proses penyusunan program?  
Informan : Tidak tahu
  - g. Bagaimana peran pendamping?  
Informan :  
Perannya yang Saya tahu mendampingi para anggota yang mendapat bantuan modal usaha agar semangat
  - h. Bagaimana proses keputusan rencana kegiatan tersebut ditetapkan? Bagaimana mengesahkannya? Siapa saja yang terlibat dalam keputusan itu?  
Informan :  
Saya tidak tahu, mungkin Pengurus Masjid dan pengelola BMT
2. Tahap assesment
- a. Bagaimana menentukan Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah?  
Informan :  
Diperuntukan untuk yang kurang mampu terutama para pedagang kecil
  - b. Bagaimana Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah dapat memberdayakan anggota kelompoknya?  
Informan :  
dapat dengan cara memberi bantuan modal usaha
  - c. Bagaimana potensi Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah bagi masyarakat?  
Informan :  
potensi sangat bagus dan mudah-mudahan lebih bermanfaat
3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan
- a. Bagaimana Masjid Raya Pondok Indah merencanakan Program Pemberdayaan Zakat sebagai alternatif dalam pemberdayaan dan bagaimana prospeknya di masa mendatang?  
Informan :  
Tidak tahu, tapi prospeknya bagus
  - b. Siapa yang dilibatkan dalam melakukan pemberdayaan?  
Informan :  
Pengurus BMT

- c. Bagaimana keterlibatan Anda dalam merencanakan program pemberdayaan ini?  
Informan : Tidak tahu
4. Tahap pelaksanaan program
- a. Bagaimana pelaksanaan program yang telah disepakati?  
Informan : kita ikuti saja program yang sudah ada
  - b. Sepengetahuan Saudara, siapa yang membina/membimbing?  
Informan : pengurus/pengelola
  - c. Bagaimana bentuk binaan/bimbingan tersebut?  
Informan : tidak formal, biasanya sambil ngobrol-ngobrol
  - d. Apakah ada sangsi dalam pelaksanaan program tersebut?  
Informan : ada sangsi, tapi bukan yang dibayangkan seperti apa gitu, intinya diingatkan oleh pengurus
  - e. Usaha apa yang dilakukan pendamping?  
Informan : memberi masukan-masuka atau jalan keluar apabila mengalami masalah
5. Tahap pemanfaatan hasil program pemberdayaan
- a. Apakah Saudara telah mendapatkan hasil dan manfaat dari program pemberdayaan ini? Keuntungan materi sebagai hasil usaha? Meningkatnya pengetahuan cara mengelola usaha? Meningkatnya keterampilan/ yang lainnya?  
Informan : ya, ada manfaatnya
  - b. Selain anggota kelompok, adakah yang memperoleh manfaat?  
Informan : ada, seperti masyarakat lain yang belum menjadi anggota
  - c. Apakah ada kegiatan rutin yang dikembangkan dari kelompok tersebut?  
Informan : tidak, setahu Saya tidak
  - d. Apakah masyarakat lain ingin menjadi anggota kelompok dari program pemberdayaan ini?  
Informan : ada
6. Tahap evaluasi
- a. Bagaimana bentuk pelaksanaan yang dilakukan terhadap program pemberdayaan tersebut?  
Informan : tidak tahu
  - b. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pada kegiatan tersebut?  
Informan : mungkin dari laporan pengembalian modal
  - c. Siapa yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut?  
Informan : pengurus atau pengelola BMT

- d. Bagaimana hasil kegiatan Program Pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya?  
Informan : cukup lumayan

7. Tahap terminasi

Bagaimana pembinaan bagi anggota kelompok tersebut yang sudah mandiri?

Informan : dapat memotivasi anggota yang lain

8. Faktor pendukung dan penghambat

- a. Apa faktor-faktor pendukung program pemberdayaan?

Informan : aksesnya sangat mudah, pengembalian modal sangat mudah, asilitas yang memadai

- b. Apa faktor-faktor penghambat program pemberdayaan?

Informan : biasanya pengembalian pinjaman saja

**PEDOMAN WAWANCARA**  
Program Pemberdayaan Zakat di Masjid Raya Pondok Indah  
Jakarta Selatan

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2013

Waktu : 10.30 – 11.00 WIB

Tempat : MRPI

**A. Identitas Informan**

1. Nama : H. Rusmono, S.Pd.I.
2. Umur : 41 tahun
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Pekerjaan : Pegawai Swasta
5. Pendidikan : S1
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Alamat : Kp. Baru I RT. 001/05 Pondok Pinang  
Keb. Lama Jakarta Selatan

**B. Pertanyaan**

1. Apakah Anda pernah mendengar program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan?
  - a. Dari siapa/dari mana Anda mendapatkan informasi ini?  
Informan : dari MRPI
  - b. Apa nama programnya?  
Informan : setahu Saya banyak, diantaranya bantuan usahabagi pedagang kecil atau dana dhu'afa bergulir yang dikelola oleh BMT Usaha Mulya, beasiswa yatim sekolah dari tingkat SD hingga SMA, program kesehatan Cuma-Cuma untuk para dhu'fa dan program bantuan untuk investasi/lembaga seperti masjid, sekolah, Majelis Ta'lim, dan lain-lain
  - c. Untuk siapa program ini diperuntukkan/kelompok sasaran program?  
Informan : seperti yang dijelaskan di atas
2. Tahap pelaksanaan program

- a. Bagaimana pelaksanaan program yang telah ada saat ini?apakah berjalan baik?  
Informan : berjalan baik dan lancar, setahu saya tidak ada kendala
  - b. Sepengetahuan Saudara, siapa yang membina/membimbing program tersebut?  
Informan : karyawan atau pengurus MRPI
  - c. Sepengetahuan Saudara, bagaimana bentuk binaan/bimbingan tersebut?  
Informan : melalui pengajian, kursus
3. Tahap pemanfaatan hasil program pemberdayaan
- a. Apakah Saudara telah melihat hasil dan manfaat dari program pemberdayaan ini?  
Informan : Ya
  - b. Menurut Saudara, selain anggota kelompok tersebut, adakah yang memperoleh manfaat?  
Informan : ada, seperti jama'ah umum
  - c. Menurut Saudara, apakah masyarakat lain ingin menjadi anggota kelompok dari program pemberdayaan ini?  
Informan : Ya, ada
  - d. Menurut Saudara, bagaimana hasil kegiatan Program Pemberdayaan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya?  
Informan : jelas ada, seperti peningkatan dari yang awalnya pinjam kemudian bisa menabung. Berarti ada peningkatan dalam usahanya